



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2016 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 di sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2016.

Selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dibidang Kehutanan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, LKj Tahun Anggaran 2016 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat



bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2017
Kepala Dinas Kehutanan

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
NIP. 19581029 108703 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas lima yaitu Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan dan prioritas sepuluh yaitu Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Visi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang secara sistematis tertuang dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 "Pemantapan Fungsi dan Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat" dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah "Mewujudkan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya, Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi serta pemulihan cadangan sumber daya alam, Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan dan Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan".

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di atas maka di tetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun (2016-2021) sebagai berikut:

1. Tujuan I: Memberikan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya. Tujuan ini diukur menggunakan capaian satu sasaran strategis yaitu Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
2. Tujuan II: Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Tujuan ini diukur menggunakan capaian satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam.
3. Tujuan III: Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan. Tujuan ini diukur menggunakan capaian satu sasaran strategis yaitu meningkatnya Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu
4. Tujuan IV: Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan. Tujuan ini diukur menggunakan capaian satu sasaran strategis yaitu Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan.



Ke empat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur melalui tujuh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai dengan 66 target kinerja kegiatan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah 306,22% yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Realisasi	Kode
1.	Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I					100	
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Realisasi	Kode
2.	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase penurunan luas lahan kritis	0,18%	0,18%	100	
		Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100%	100%	100	
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	5%	82,82%	1.657,60	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II					619,2	
3.	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	80%	375,66%	469,58	
		Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	80%	98,10%	122,63	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III					296,10	
4.	Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	5.32%	11,15%	209,58	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV					209,58	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV					306,22	



Indikator *outcome* yang ditargetkan pada Tahun 2016 adalah indikator Kinerja Utama (IKU), berupa indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Capaian IKU Tahun 2016 selanjutnya digunakan untuk menilai capaian Sasaran Strategis Tahun 2016. Pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2016 yang didukung capaian IKU (*outcome*) adalah sebagaimana digambarkan dalam Tabel di atas dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis "Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya" Tahun 2016 sebesar 100% tercermin dari capaian 1 (satu) IKU.
2. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam" Tahun 2016 sebesar 619,2% tercermin dari capaian 3 (tiga) IKU.
3. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu" Tahun 2016 sebesar 296,10% tercermin dari capaian 2 (dua) IKU.
4. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm" Tahun 2016 sebesar 209,58% tercermin dari capaian 1 (satu) IKU.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2016 dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa faktor penghambat dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

DAFTAR ISI



	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Aspek Strategis.....	2
1.5 Struktur Organisasi.....	5
1.6 Analisis Perkembangan Strategis.....	6
1.6.1 Kondisi Saat Ini.....	7
1.6.2 Kondisi yang Diharapkan.....	9
1.7 Peningkatan Sistem Akip dan Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	10
1.8 Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	12
2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	12
2.2 Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	19
2.4 Rencana Kinerja Sasaran.....	20
2.5 Rencana Kinerja Kegiatan.....	22
2.6 Rencana Anggaran Tahun 2016.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	29
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	30
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja.....	32
BAB IV PENUTUP.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	iv
Tabel 2.	Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan 2016-2021.....	4
Tabel 3.	Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021..	14
Tabel 4.	Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran.....	15
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	20
Tabel 6.	Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	20
Tabel 7.	Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2016.....	22
Tabel 8.	Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2016.....	27
Tabel 9.	Alokasi Dana per Sasaran Tahun Anggaran 2016.....	27
Tabel. 10.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	29
Tabel. 11.	Tabel Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	30
Tabel 12.	Tujuan dan Sasaran Strategis I.....	32
Tabel 13.	Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya Hutan Tahun 2016.....	33
Tabel 14.	Perbandingan capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	33
Tabel 15.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.....	34
Tabel 16.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau.....	34
Tabel 17.	Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2016.....	36
Tabel 18.	Capaian Target IKU Persentase Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Sesuai Dengan Fungsi Dan Peruntukannya per Triwulan Tahun 2016	37
Tabel 19.	Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat.....	38
Tabel 20.	Pencapaian Terhadap Target Sasaran Strategis I Sesuai Yang Tertuang Pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	41
Tabel 21.	Tujuan dan Sasaran Strategis II.....	42
Tabel 22.	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Hutan Dan Lahan	



	Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun 2016.....	43
Tabel 23.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Hutan Dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	44
Tabel 24.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Hutan Dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.....	45
Tabel 25.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Hutan dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau.....	46
Tabel 26.	Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Hutan dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun 2016.....	49
Tabel 27.	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis per Triwulan Tahun 2016.....	52
Tabel 28.	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Penanaman Tahun 2011.....	52
Tabel 29.	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis per Triwulan Tahun 2016.....	54
Tabel 30.	Perkembangan Kasus Illegal Logging/Tindak Pidana Bidang Kehutanan Tahun 2016	55
Tabel 31.	Jumlah Kelompok Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2016 di Sumatera Barat.....	56
Tabel 32.	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (<i>Hot Spot</i>) Dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015) Tahun 2016 Setiap Triwulannya.....	58
Tabel 33.	Jumlah Hot Spot (Titik Api) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 berdasarkan Pantauan Satelit NOAA.....	60
Tabel 34.	Luas Kebakan Hutan dan Lahan di Sumatera Barat Tahun 2016.....	61
Tabel 35.	Tujuan dan Sasaran Strategis III.....	65
Tabel 36.	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2016.....	66
Tabel 37.	Perbandingan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	66
Tabel 38.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.....	67
Tabel 39.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau.....	67
Tabel 40.	Realisasi Pencapaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis III Tahun 2016.....	70
Tabel 41.	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis per Triwulan Tahun 2016.....	71



Tabel 42.	Target Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Penerimaan PSDH dan DR Tahun 2016 di Sumatera Barat.....	72
Tabel 43.	Rekapitulasi Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Sumatera Barat di Sumatera Barat.....	76
Tabel 44.	Capaian Target IKU Optimalisasi PNBK Sektor Kehutanan Tahun 2016 Setiap Triwulannya.....	78
Tabel 45.	Target dan Realisasi Penerimaan PSDH dan DR Tahun 2016.....	79
Tabel 46.	Tujuan dan Sasaran Strategis IV.....	81
Tabel 47.	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengelolaan Hutan Melalui Pola HTR, HN dan HKm Tahun 2016.....	82
Tabel 48.	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengelolaan Hutan Melalui Pola HTR, HN dan HKm Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	82
Tabel 49.	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengelolaan Hutan Melalui Pola HTR, HN dan HKm s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.....	83
Tabel 50.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat/Kemitraan Pada Provinsi Sumatera Barat Dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau.....	83
Tabel 51.	Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis IV Tahun 2016.....	84
Tabel 52.	Capaian Target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat/Kemitraan Per Triwulan Tahun 2016.....	86
Tabel 53.	Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial.....	87
Tabel 54.	Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	89
Tabel 55.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	100



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	6
Gambar 2. Perbandingan Capaian Indikator Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.....	35
Gambar 3. Pencapaian Target Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.....	40
Gambar 4. Jumlah titik panas (hot spot) pada enam tahun terakhir yang terpantau melalui satelit NOAA pada Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.....	47
Gambar 5. Pencapaian Target Persentase unit penggunaan kawasan hutan Capaian kinerja indikator "Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.....	47
Gambar 6. Perkembangan Jumlah Kasus Illegal Logging yang Ditangani Lima Tahun Terakhir.....	56
Gambar 7. Angka <i>Toleransi</i> Titik Panas (<i>Hot Spot</i>) dan Realisasi <i>Hot Spot</i> Tahun 2015-2016.....	59
Gambar 8. Kebakaran Hutan di Kota Sawahlunto.....	63
Gambar 9. Perbandingan Realisasi Penerimaan PNB (DR dan PSDH) di Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat.....	68
Gambar 10. Perkembangan Produksi Hasil Huta Kayu (HHK) Lima Tahun Terakhir.....	77
Gambar 11. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan Lima Tahun Terakhir....	80
Gambar 12. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Lima Tahun Terakhir.....	87



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja SKPD
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan
- Lampiran 3. Certificate ISO 9001:2008



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap kepala SKPD diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, disusun sebagai pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016, perjanjian kinerja yang dilaksanakan tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat (RPJMD) 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yang didanai baik dari APBD maupun sumber dana lainnya. Laporan kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016 dan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan pada khususnya dan Pembangunan Sumatera Barat pada umumnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dengan demikian, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat.

Selain itu, penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan Kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.



1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diberikan tugas untuk tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kehutanan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Kehutanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dinas, Bidang Pemanfaatan Hutan, Planologi Kehutanan, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kehutanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 ASPEK STRATEGIS

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan di Sumatera Barat sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Sumatera Barat. Adapun peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. *Pemantapan kawasan hutan melalui proses percepatan penyelesaian RTRW Substansi kehutanan dan Penyiapan Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat.*
2. Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah hotspot dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.
3. *Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan illegal logging* melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta



penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).

4. Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPHL serta pengelolaan hutan rakyat.
5. Meningkatkan sumbangan devisa dan PNBPN dari hutan produksi melalui optimalisasi produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, HHHBK serta ekspor melalui perbaikan perijinan, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), penataan industri dan cluster industries, pengelolaan dan operasionalisasi KPHP.
6. Percepatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dengan melibatkan peran masyarakat dengan upaya peningkatan modal sosial dalam mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan menghubungkannya dengan kemitraan.
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Makro dan Pembangunan bidang kehutanan melalui forum koordinasi antara Institusi yang menangani bidang kehutanan ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah menetapkan sepuluh prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur dan;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.



Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang kesepuluh yaitu "Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana"

Dukungan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian dimaksud melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Kebakaran Hutan, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan, Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

Secara detail kaitan antara RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan 2016-2021.

MISI	PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan. 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan. 4. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan. 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. 6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 7. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI



Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Kehutanan.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselorening berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi, dalam perkembangannya sesuai kebutuhan organisasi mengalami penambahan eselon III dan empat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

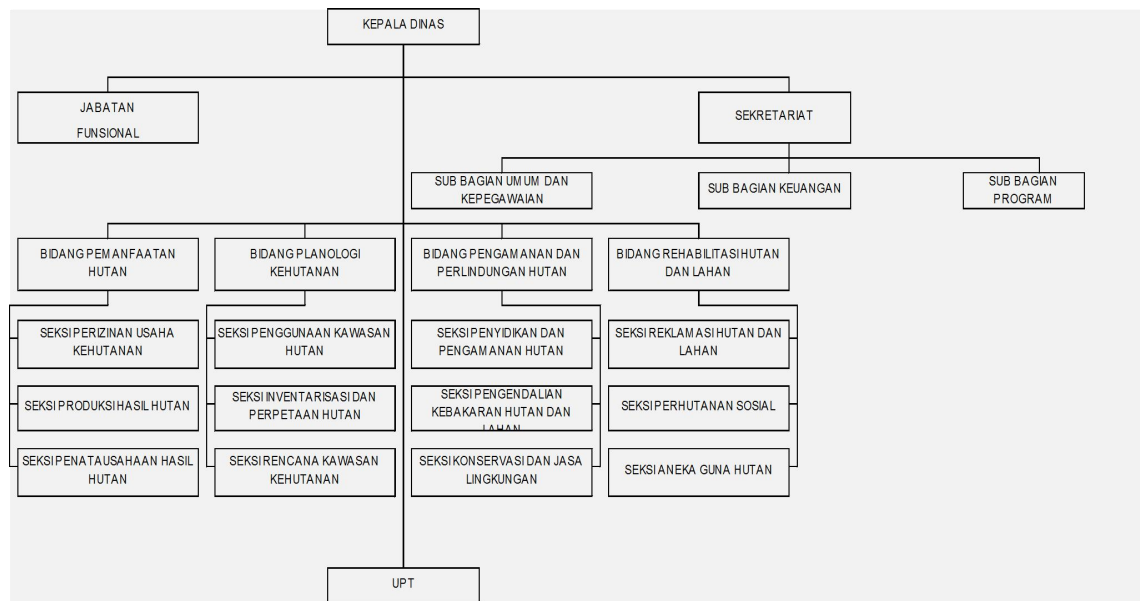
1. Kepala Dinas dijabat oleh Ir. Hendri Octavia, M.Si
2. Sekretaris dijabat oleh Yofi Yori, SE, M.Si yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Suyatno, BSc
 - b. Sub Bagian Keuangan dijabat oleh Purnama, BAc
 - c. Sub Bagian Program dijabat oleh Jusmalinda, S.Hut, M.Si
3. Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Ir. Mgo Senatung, M.P yang membawahi:
 - a. Seksi Produksi Hasil Hutan dijabat oleh Ir. Saida R. Nauli
 - b. Seksi Perizinan Usaha Kehutanan dijabat oleh Syamsul Bahri, S.Hut, M.Si
 - c. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dijabat oleh Adrianto, SH, M.Si
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabat oleh Yonefis, SH, MM yang membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dijabat oleh Dudi Badrudin, S.Hut.T
 - b. Seksi Aneka Guna Hutan dijabat oleh Boy Martin, SH, M.Si
 - c. Seksi Perhutanan Sosial dijabat oleh Kusworo, SP, M.Si
5. Kepala Bidang Planologi Kehutanan dijabat oleh Ir. Ruswin Rustam yang membawahi:
 - a. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan dijabat oleh Sayogo Hutomo, S. Hut, MP
 - b. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan dijabat oleh Joni Halyan, SH, MH
 - c. Seksi Rencana Umum Kehutanan dijabat oleh Afrial Muhammad, SPt, M.Si
6. Kepala Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan dijabat oleh Faridil Afrasy, S. Hut, MM yang membawahi:
 - a. Seksi Konservasi dan Jasa Lingkungan dijabat oleh Novi Hendri, S.hut, M.Si
 - b. Seksi Penyidikan dan Pengamanan Hutan dijabat oleh Yanuar Bachril, SH, M.Si
 - c. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dijabat oleh Mukhlis, S.Sos, S.Hut, M.Si
7. Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dijabat oleh Ir. Eka Meinarsih yang membawahi:



Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

- a. Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Fazul Taufik ST, M.T
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Benih dijabat oleh Era Sulastri, S.Hut, M.Si
 - c. Seksi Informasi dan Peredaran Benih dijabat oleh Imran, SE
8. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dijabat oleh Bambang Suyono, S.Hut yang membawahi:
- a. Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Ir. Edi Syafnir
 - b. Seksi Usaha Kawasan dijabat oleh Hendra Bhakti, SE
 - c. Seksi Konservasi Kawasan dijabat oleh Riyos Zanea Putra SE

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

1.6 ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mencakup kawasan hutan, sensitifitas kehutanan, penanggulangan illegal logging, rehabilitasi hutan dan lahan, pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan dan optimalisasi pemanfaatan hasil dan industri kehutanan.

Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi keberlanjutan pembangunan kehutanan selanjutnya di Provinsi Sumatera Barat. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Kondisi Saat ini

1.6.1.1 Ekologi



Kawasan hutan dan hutan secara ekologis memiliki peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, berfungsi sebagai penyangga sumber kehidupan, pengatur tata air, ekosistem dan menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak karena hutan merupakan *Mother of Agricultural* (Pertanian, Sumber Energi Listrik, Pengairan dll).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar, sehingga secara keseluruhan Provinsi Sumatera Barat memiliki Kawasan Hutan **seluas ± 2.380.057 Ha (56,27%) dari luas wilayah ± 4.229.730,00 Ha** yang terdiri dari:

- Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam ± 806.939 Ha,
- Hutan Lindung (HL) ± 791.671 Ha,
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 233.211 Ha,
- Hutan Produksi (HP) seluas ± 360.608 Ha,
- Hutan Produksi Konservasi (HPK) seluas ± 187.629 Ha,
- Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 1.849.673 Ha,

Melihat komposisi tersebut diatas, Kawasan Hutan Sumatera Barat di dominasi oleh hutan konservasi dan lindung terhapar dipinggang bukit barisan yang merupakan hulu-hulu sungai yang bermuara ke Provinsi tetangga (Jambi dan riau), dengan kondisi fisik bertopografi sedang hingga berat, kontur bergelombang didominasi oleh berbagai jenis vegetasi perdu hingga pohon-pohonan dan didiami oleh berbagai jenis satwa.

Sebagai salah satu sumber daya produktif, kawasan hutan di Sumatera Barat juga menjadi "primadona" dalam kerangka Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Hal ini telah dibuktikan dengan dijadikannya Sumatera Barat sebagai model pengembangan Perhutanan Sosial (PS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi vertikal. Namun demikian masih ditemui beberapa masalah diantaranya masalah tenurial yang mewarnai (hampir) seluruh kawasan hutan di Sumatera Barat. Tingginya alih fungsi lahan yang disebabkan perambahan kawasan hutan untuk perladangan, perkebunan dan kegiatan lainnya di luar bidang kehutanan, dengan dalih tanah ulayat oleh segelintir masyarakat (keberadaan tanah ulayat memang diakui) ataupun tidak, cukup mempertontonkan dikotomi hukum formal dan hukum adat. Di sisi lainnya, kepastian batas kawasan hutan belum sepenuhnya terpatri secara jelas baik fisik lapangan dan dukungan peta-peta kawasan hutan. Bahkan, terdapat beberapa daerah (khususnya terkait konflik lahan), pengakuan atas keberadaan kawasan hutan oleh masyarakat juga masih rendah.

Tidak hanya sebatas itu, dampak dari alih fungsi lahan, apalagi dilakukan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi, cukup banyak menyebabkan ancaman terhadap kelestarian kawasan hutan. Lahan kritis yang tersebar di dalam dan luar kawasan hutan,



kebakaran hutan, bahkan sering terjadinya banjir dan tanah longsor merupakan beberapa dampaknya.

Disamping itu bidang Kehutanan juga memiliki sensitifitas yang sangat tinggi baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun dunia Internasional. Dengan sangat tingginya perhatian multi pihak terhadap pengelolaan hutan maka apabila terjadi "*Miss Management*" dan "*Conflict of Interest*" bisa menimbulkan Pro dan Kontra oleh berbagai pihak tersebut diatas, untuk itu pengelolaan hutan harus diurus secara tersendiri dan secara profesional.

1.6.1.2 Sosial/Ekonomi

Ketentuan terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sudah cukup banyak dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari ketentuan yang ada, pada dasarnya penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip dasar penggunaan dan pemanfaatan hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fasilitasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan nasional. Sumatera Barat dengan kawasan hutan yang sangat luas, memiliki peluang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dimungkinkan dari ketentuan pengelolaan hutan seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam dan lain-lain sudah mulai di"galakkan" di Sumatera Barat. Sedianya, upaya-upaya tersebut setidaknya akan mengurangi tekanan-tekanan terhadap kawasan hutan.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu. Saat ini, pemanfaatan hasil hutan kayu di Sumatera Barat diberikan oleh Menteri Kehutanan pada 7 (tujuh) perusahaan yang terdiri dari 4 (empat) IUPHHK-HA dan 4 (empat) IUPHHK-HT. Masih sangat diperlukan pembinaan yang terus-menerus dari instansi kehutanan agar prinsip kelestarian produksi dan kelestarian sumberdaya dalam pelaksanaan IUPHHK dapat tercapai.

Kebutuhan masyarakat akan bahan bangunan seperti kayu ikut mendorong tumbuhnya Industri Hasil Hutan berupa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)/Sawmill baik legal maupun illegal. Perhitungan kapasitas terpasang industri pengolahan kayu yang legal dan sudah didaftar ulang sebanyak 70 unit adalah $\pm 203.550 \text{ m}^3$ pertahun (setara dengan 407.100 m^3 kayu bulat dengan asumsi rendemen 50 %). Untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku Industri tersebut baik berupa kayu bulat maupun kayu gergajian masih didatangkan dari luar Provinsi Sumatera Barat dan mengandalkan kepada Produksi Hutan Alam. Akibat kapasitas industri pengolahan kayu diatas yang tidak disertai dengan kemampuan suplai bahan baku secara lestari memicu peningkatan kasus penjarahan, penyerobotan dan pengambilan hasil hutan secara illegal yang pada akhirnya dapat mengakibatkan Kerusakan lingkungan.



1.6.1.3 Kelembagaan

Untuk menjalankan penyelenggaraan Fungsi dan Tugas Pokok, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 135 Orang dengan status kepegawaian 132 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Berdasarkan latar belakang pendidikan terbagi atas:

- a. Pasca Sarjana (S2): 21 Orang
(Kehutanan : 3 orang, Non Kehutanan : 18 orang)
- b. Sarjana (S1): 37 Orang
(Kehutanan: 23 orang, Non Kehutanan: 14 orang)
- c. Diploma (D1/D3): 8 Orang
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA): 61 orang
(SKMA: 4 Orang, Non SKMA: 57 orang)
- e. Sekolah Menengah Pertama (SMP): 6 orang
- f. Sekolah Dasar (SD): 2 orang

Dari jumlah tersebut diatas beberapa orang diantaranya adalah tenaga fungsional berupa:

- a. 15 orang Tenaga fungsional Polisi Kehutanan,
- b. 3 orang calon tenaga fungsional penyuluh kehutanan,
- c. 2 orang calon tenaga fungsional Pengamat Ekosistem Hutan dan
- d. 21 orang Tenaga Teknis Kehutanan lainnya seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, Juru Ukur, Tenaga Teknis Penatausahaan Hasil Hutan, Brigade Pemadam Kebakaran Hutan dan Laha dan lain-lainnya.

1.6.2 Kondisi yang Diharapkan

Sesuai dengan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 pelaksanaan pembangunan kehutanan diarahkan untuk mencapai kondisi yang mendukung bagi terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas baik secara ekologi, sosial/ekonomi maupun secara kelembagaan, secara rinci kondisi dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1.6.2.1 Ekologi

Kondisi ekologi yang diinginkan antara lain adalah seimbangannya ekosistem hutan dalam menyangga kehidupan manusia khususnya melalui pemantapan batas kawasan hutan dan meningkatnya pengakuan keberadaan kawasan hutan oleh para pihak, sehingga diharapkan dapat menurunnya praktek-praktek illegal logging, perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan serta perdagangan kayu illegal, terkendalinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, terciptanya prakondisi kesatuan pengelolaan hutan, meningkatnya fungsi hutan dan lahan yang telah terdegradasi melalui dukungan informasi dan perencanaan kehutanan yang lengkap dan terpadu.

1.6.2.2 Sosial/Ekonomi

Kondisi sosial/ekonomi yang diinginkan antara lain adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, minat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pemahaman para pihak terkait hutan dan kehutanan disamping



terciptanya prakondisi mitigasi perubahan iklim tercipta sehingga diharapkan masyarakat sekitar hutan dapat meningkatkan perkapita mereka melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di dalam dan sekitar kawasan hutan, penyediaan kayu dari hutan tanaman, restrukturisasi industri dan optimalisasi industri perkayuan dan hasil hutan lainnya yang berorientasi pada pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan efisiensi penggunaan bahan baku hasil hutan serta berkembangnya usaha-usaha kehutanan seperti HHBK serta pembibitan dan perbenihan tanaman hutan.

1.6.2.3 Kelembagaan

Kondisi kelembagaan yang diinginkan antara lain meningkatnya kemampuan struktural dan fungsional organisasi, dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta koordinasi yang mantap dengan pusat dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan kehutanan.

1.7 PENINGKATAN SISTEM AKIP DAN INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan tersebut. Salah satu upaya peningkatan sistem AKIP yang dikembangkan adalah melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala, yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan.

Inovasi peningkatan mutu pelayanan publik juga dikembangkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui implementasi ISO 9001:2008. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya sertifikat ISO 9001:2008 dari Tuv Rheinland yang merupakan lembaga sertifikasi ISO dengan nomor sertifikat 011001432985 pada tanggal 13 Februari 2015, dan berdasarkan hasil *2nd Follow Up Audit* yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016 dinyatakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berhak untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 tersebut. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dengan patuh pada Sistem Operasional Prosedur seperti yang tertuang dalam dokumen Standar Manual Mutu ISO 9001:2008 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan memenuhi seluruh sasaran mutu waktu pelayanan yang juga tertuang pada dokumen di atas. Setiap masyarakat yang hendak mendapatkan layanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat melihat Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan tata waktu penyelesaian layanan yang terpampang pada setiap unit kerja sesuai dengan jenis layanannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat pengguna layanan mengetahui dengan jelas alur proses layanan yang mereka mohonkan sehingga meyakinkan mereka bahwa layanan mereka akan selesai sesuai mutu waktu yang tertera pada SOP setiap jenis layanan. Sehingga menguatkan bahwa Dinas



Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk selalu menerapkan *Good Governance and Clean Government*.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 meliputi RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2016.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

RPJMD 2016-2021 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan ini telah ditetapkan kerangka Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berperadapan tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi dan hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan public, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah: **1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”;** **2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;** **3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;** **4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;** **5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.**

Selanjutnya berdasarkan visi, misi dan agenda tersebut pemerintah daerah Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut: **1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;** **2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;** **3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;** **4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;** **5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;** **6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan Peningkatan investasi;** **7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;** **8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;** **9.**



Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur; 10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari sepuluh prioritas di atas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah **prioritas10 yaitu Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.**

2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Secara ringkas rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

2.2.1 PERNYATAAN VISI DAN MISI

Berkaitan dengan kondisi dan komposisi kawasan hutan di Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan berupaya mengoptimalkan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya secara seimbang guna peningkatan pembangunan Sumatera Barat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Sumatera Barat menitikberatkan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat sebagai *ultimate beneficiaries* pembangunan Kehutanan.

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) untuk RPJM ke-3, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2015-2019, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, maka **visi** Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah:

"PEMANTAPAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan **misi** sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya.
2. Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi serta pemulihan cadangan sumber daya alam.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan.
4. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan.



2.2.2 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan lima tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 yaitu:

1. Memberikan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya
2. Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan
4. Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan.

2.2.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 adalah pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Memberikan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100
2.	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	0.18	0.42	0.68	1.07	1.52	1.71
			Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	10	15	20	25	30



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	%	80	81	82	83	84	85
			Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	%	80	81	82	83	84	85
4.	Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan	Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan	%	5.32	8.50	11.68	14.86	18.04	21.21

2.2.3 CARA MENCAPAI SASARAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan kedalam program dan kegiatan pembangunan kehutanan yang dikerjakan secara bertahap per tahun. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat tidak dapat lepas dari kebijakan Pembangunan Kehutanan Nasional melalui kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat maka kebijakan dan strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci kebijakan dan strategi pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel langkah-langkah strategis pencapaian sasaran pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Pemantapan Kawasan Hutan	Percepatan Proses Penyelesaian review RTRW subttansi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> Program Perencanaan makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Planologi dan Tata Lingkungan



Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			Lainnya Kementerian LHK (APBN)	
Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim	Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (APBD) 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan dan Perlindungan Hutan - Pengembangan Ekwisata dan Jasa Lingkungan - Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan KOnservasi SDA - Pengembalian Dampak Perubahan Iklim - Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH - Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem - Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Pengendalian Perubahan Iklim
	Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan	Penyediaan bibit dan peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Rehabilitasi Hutan & Lahan (APBD) 2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (APBD) 3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit/benih Tanaman Hutan - Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan - Konservasi Sumber Daya Genetik - Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Pengembangan Sarana Konservasi Tanah - Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL - Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS - Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan - Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK) - Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK) - Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK) - Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional KPH (DAK) - Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung



Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			LHK (APBN)	
Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan (APBD) 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu - Optimalisasi PNBP - Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman - Pengembangan Pengujian, Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan - Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH) - Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan - Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan
Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Peningkatan kelompok masyarakat pengelola hutan melalui skema HTR, HN dan HKm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan & Pengembangan Hutan (APBD) 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam (APBD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKM, HTR, HD dan HR Kemitraan - Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan - Penguatan Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat - Penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah - Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan - Program, evaluasi dan pelaporan - Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan - Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan - Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP



Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Jaminan BMD - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan - Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan, PerUU - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah - Penyediaan Jasa Sopir - Penyediaan Jasa Pengaman Kantor - Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi - Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
			5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (APBD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung Kantor - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - Pengadaan Meubelier - Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi - Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi - Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi dan Jaringan - Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
			6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (APBD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			7. Program Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan



Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			Kapasitas Sumber Daya Aparatur (APBD) 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (APBD)	PerUU - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD - Penatausahaan Keuangan SKPD

Sumber: Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan pemberi amanah yaitu Gubernur Sumatera Barat sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat perjanjian kinerja tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan arahan tim evaluasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021. Oleh karena itu Indikator dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 setelah melalui evaluasi dan arahan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.



Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%
2	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	a. Persentase penurunan luas lahan kritis b. Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani c. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	0,18% 100% 5%
3	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	a. Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) b. Optimalisasi PNBK sektor kehutanan	80% 80%
4	Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	a. Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	5,32%

2.4 RENCANA KINERJA SASARAN

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Kehutanan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan Tahun 2016 adalah tahun pertama untuk Renstra Dinas Kehutanan periode Tahun 2016-2021 yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
I	Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	Percepatan Proses Penyelesaian review RTRW substansi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)
II	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta	- Persentase penurunan luas lahan kritis - Persentase jumlah	0.18%	Penyediaan bibit dan peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (APBD)



No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
	pemulihan cadangan sumber daya alam	kasus illegal logging yang tertangani - Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	100% 5%	Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan serta penguatan partisipasi masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (APBD) 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam (APBD) 4. Program Pengendalian Kebakaran Hutan (APBD) 5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)
III	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	- Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) - Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	80% 80%	Peningkatan Kinerja Kinerja pengusaha dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (APBD) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)
IV	Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	- Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	5.32%	Peningkatan kelompok masyarakat pengelola hutan melalui skema HTR, HN dan HKm	1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan (APBD) 2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam (APBD) 3. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran (APBD) 4. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur (APBD) 5. Program Peningkatan



No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
					Disiplin Aparatur (APBD) 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (APBD) 7. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan (APBD) 8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)

Sumber: Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

2.5 RENCANA KINERJA KEGIATAN

Dalam implementasinya Rencana Kinerja Sasaran diatas akan dicapai dengan melaksanakan Program Pembangunan Kehutanan maupun Program Pendukung lainnya yang terdiri dari Kegiatan-kegiatan Pembangunan Kehutanan maupun kegiatan Pendukung sehingga Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Kinerja Kegiatan. Secara ringkas Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 yang akan dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2016

No.	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)
1.	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	- Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 Km
		Inventarisasi Potensi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	- Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu	3 Judul
		Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan	- Tersedianya data potensi dan pengembangan jasa lingkungan dan ekowisata	2 Laporan
		Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	- Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukan	13 Kab/kota
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Planologi dan Tata Lingkungan	- Hasil Planologi dan Tata Lingkungan	3 Laporan



No.	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)
2.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	- Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prefresif/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi	6 Laporan
		Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	- Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	13 Lokasi
		Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	- Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/perambahan	4 Lokasi.
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	- Terlaksananya pelatihan Tenaga PPHBN dan Penguatan Lembaga PPHBN serta Sosialisasi Perda peran Serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan	90 Orang
		Pegendalian Dampak Perubahan Iklim	- Terlaksananya monev implementasi REDD+ dan inventarisasi emisi gas rumah kaca bidang kehutanan	19 Kab/Kota
		Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan	- Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar kawasan hutan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan	5 Laporan
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	- Hasil konservasi SDA dan ekosistem	3 laporan
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Hasil penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	1 laporan
3	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	33 Kali
		Pengendalian Perubahan Iklim	- Hasil pengendalian perubahan iklim	4 Laporan
4.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	- Meningkatnya kuantitas dan kualitas bibit	200.000 batang
		Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	- Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman, tersedianya informasi perbenihan tanaman hutan, terbentuknya pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, tersedianya bibit tanaman hutan yang bermutu baik	13 Kab/Kota
		Konservasi Sumber Daya Genetik	- Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan jabon di Kabupaten Dharmasraya	4Lokasi
5.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	- Terehabilitasinya lahan kritis di daerah penyangga Hutan Desa/HKm	65 Ha
		Pengembangan Sarana Konservasi tanah	- Terbangunnya bangunan konservasi tanah	2 Unit



No.	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)
		Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL	- Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/DAK oleh Kab/Kota	18 Laporan
		Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS	- Tersedianya Buku Himpunan Peraturan Pengelolaan DAS	7 Pergub
		Rehabiltasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan	- Tersedianya dokumen rancangan Kegiatan RHL dan terbinanya pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh pemegang Izin	2 Dokumen
		Rehabiltasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK luncuran)	- Terlaksananya penanaman Rotan dan Pembangunan Bank Buah	50 Ha
		Rehabiltasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 dan Pendukung)	- Terlaksananya Pembangunan Hutan Tanaman Jabon dan Pemeliharaan I Tanaman Jabon pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan	60 Ha dan 35 Ha
		Rehabiltasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 + Pendukung)	- Terlaksananya rehabilitasi hutan kritis, terpeliharanya tanaman rehabilitasi hutan hasil penanaman tahun sebelumnya dan tersusunnya rancangan kegiatan	125 Ha dan 35 Ha
		Peningkatan Sarana Prasarana Opearsional KPHL Bukit Barisan (DAK 2016)	- Tersedianya sarana prasarana operasional KPHL Bukit Barisan	1 Paket
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	- Hasil pengendalian DAS dan hutan lindung	7 Laporan
6.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksih Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Laporan
		Optimalisasi PNBK	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK Hutan Alam	3 Laporan
		Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan Olah, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman	3 Laporan
		Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan	1 Laporan
		Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)	- Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan	10 Kelompok
		Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah KPHL Bukit Barisan	- Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPHL Bukit Barisan	2 Lokasi
		Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bkit Barisan	- Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan	3 Laporan
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	- Hasil pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan	8 Laporan
7.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	- Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota	19 Kab/kota



No.	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	60 Orang
		Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (Hkm, HN, HTR dan HR Kemitraan)	17 Kelompok
		Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	- Terjalinnnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)	60 Orang
		Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah	- Terlaksananya pengumpulan, koordinasi dan monitoring Kelompok Kerja Mangrove Daerah	1 Dokumen
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	- Hasil perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan	5 Laporan
8.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	- Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan website kehutanan, pembuatan dokumen statistik kehutanan dan penyebarluasan informasi kehutanan serta rekonsiliasi penguatan sistem informasi kehutanan	4 Laporan
		Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan	- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan, pembinaan DAK bidang kehutanan dan rapat monev	3 Laporan
		Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	- Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2008 pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, audit internal dan audit eksternal	3 Laporan
9.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	- Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 Tahun
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD	1 Tahun
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	49 Unit
		Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan	12 bulan
		Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan
		Penyediaan Jasa Sopir Kantor	- Tersedianya jasa sopir kantor	12 bulan
Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	- Terlaksananya makan dan minum untuk piket senjata api dan pengamanan kantor	12 Bulan		



		Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	- Tersedianya jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan
		Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	- Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam; pembacaan Al-Quran; Ustadz	12 Bulan
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung kantor	- Terlaksananya pembangunan gedung kantor UPTD, gudang persemaian, pagar persemaian, pembangunan koridor, pembangunan garase UPTD, bangunan pos jaga UPTD	6 Unit
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua	6 Unit
		Pengadaan Mubelair	- Terlaksananya penyediaan meubelair	72 Unit
		Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	- Terlaksananya pengadaan Komputer, laptop, scanner A0	15 Unit
		Pengadaan peralatan studio, alat komunikasi dan informasi	- Terlaksananya alat studio, komunikasi dan informasi	10 Unit
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	6 Unit
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya perbaikan sarana prasarana mushala, perbaikan jendela dan atap gedung	3 Unit
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	12 Bulan
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	53 Unit
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	39 Unit
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik dan jaringan internet kantor	1 Tahun
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	- Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset	12 Bulan	
11.	Peningkatan Disiplin	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Terlaksananya penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	154 Stel
12.	Peningkatan Kapasitas Sumber daya	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Terpenuhinya keikutsertaan dalam bintek implementasi peraturan perundang-undangan	6 Kali
13.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan	5 Dokumen
		Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	- Penyusunan RKA, DPA, DPPA, bahan ekspose, Renja dan Draft Renstra	6 Dokumen
		Penatausahaan Keuangan SKPD	- Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran	12 bulan

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

2.6 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016

Jumlah pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) yang dialokasikan untuk pembangunan bidang kehutanan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar **Rp 26,541,581,143,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini.



Tabel 8. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	BelanjaTidakLangsung	10.971.740.718	41,34
2	BelanjaLangsung	15.569.840.425	58,66
Jumlah		26.541.581.143	100

Sumber: APBD Perubahan Sumbar 2016

Dari alokasi anggaran belanja di atas, belanja langsung dibanding dengan Tahun 2015 naik sebesar Rp 7.231.259.000,- dari Rp 8.338.581.425,- menjadi Rp 15.569.840.425 atau sekitar 86,72%. Dilihat dari proporsi antara belanja langsung dengan tidak langsung pada Tahun 2016 maka porsi belanja langsung pada Tahun 2016 naik sebesar 15,23% dari 43,44% pada tahun 2015 menjadi 58,66% pada Tahun 2016. Sementara belanja tidak langsung turun sekitar 15,23 dari 56,56% pada Tahun 2015 menjadi 41,34% pada Tahun 2016, hal ini berarti alokasi untuk pembangunan kehutanan pada Tahun 2016 lebih baik dari Tahun 2015 ditandai dengan semakin bertambahnya proporsi anggaran untuk belanja modal dan pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan (belanja langsung) dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk belanja pegawai (belanja tidak langsung).

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kehutanan dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Alokasi Dana per Sasaran Tahun Anggaran 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1.	Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	- Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	372.362.550	4,55
2.	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	- Persentase penurunan luas lahan kritis	4.930.093.450	60,18
		- Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	968.003.000	11,82
		- Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	253.170.000	3,09
3.	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	- Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	753.416.500	9,20
		- Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	124.760.000	1,52



4.	Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	790.290.400	9,65
Jumlah Belanja Langsung			8.192.095.900	100

Pada Tabel 8 di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar **Rp 8.192.095.900,-** dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan Daya Dukung Hutan dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam yaitu sebesar 75,09%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah Meningkatkan Produksi Dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yaitu sebesar 10,72%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan Kemitraan Dengan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Melalui Pola HTR, HN Dan Hkmyaitu sebesar 9,65% dan Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi Dan Peruntukannya yaitu sebesar 4,55% dari total anggaran belanja langsung.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil(*outcome*) maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk membangun akuntabilitas kinerja ini antara lain dengan mengimplementasikan ISO 9001:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kehutanan yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik yang dilakukan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi.

Laporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka skala penilaian terhadap kinerja pemerintah yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Klasifikasi	Predikat	Kode
1.	85% - 100%	Sangat Baik	
2.	69% - 84%	Baik	
3.	53% - 68%	Cukup	
4.	< 53%	Gagal	

Sumber: Arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tahun Anggaran 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran Pembangunan Kehutanan sebesar Rp 15.569.840.425,- yang berasal dari dana APBD dan dari dana dekonsentrasi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebesar Rp 3.386.980.000,-. Alokasi dana APBD, jika dibandingkan dengan alokasi dan tahun anggaran 2015 yaitu Rp 8.338.581.425,- terjadi peningkatan sebesar 86,76%. Alokasi dana APBD terdiri dari Belanja Langsung Kegiatan yaitu sebesar Rp 8.192.095.900,- dan Belanja Langsung Pokok sebesar Rp 7.377.744.525,-

Seluruh anggaran tersebut diatas digunakan untuk mencapai empat sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Empat sasaran tersebut adalah:

- 1. Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.**
- 2. Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam.**
- 3. Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.**
- 4. Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm.**

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukanlah pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Provinsi lain yang berdekatan.

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 10. selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Tabel Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Realisasi	Kode
1.	Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I					100	



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Realisasi	Kode
2.	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase penurunan luas lahan kritis	0,18%	0,18%	100	
		Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100%	100%	100	
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	5%	82,82%	1.657,60	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II					619,2	
3.	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	80%	375,66%	469,58	
		Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	80%	98,10%	122,63	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III					296,10	
4.	Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	5.32%	11,15%	209,58	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV					209,58	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV					306,22	

Sumber: Diolah dari data Primer, penetapan kinerja dan monev pembangunan kehutanan 2016

Dari Tabel 11 di atas dapat dilihat hasil pengukuran kinerja menunjukkan 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2016 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 306,09% yang termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Dari tujuh Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel di atas dapat dilihat secara umum bahwa pencapaian kinerja pada kategori berhasil (sesuai bahkan beberapa indikator capaiannya melebihi target). Capaian realisasi indikator tertinggi adalah "Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" hal ini disebabkan pada Tahun 2016 kondisi cuaca dan iklim di Sumatera Barat tidak terlalu panas dan sering hujan.

Hasil pencapaian kinerja sebagaimana tergambar dalam Tabel 10 di atas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan kehutanan di atas merupakan hasil



realisasi program/ kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Instansi Kehutanan di Kabupaten/ Kota.

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Tabel 11 selanjutnya sub bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

I. Memberikan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya

Tujuan **Memberikan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya** dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya** dan diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Tujuan dan Sasaran Strategis I

TUJUAN 1	SASARAN 1
Memberikan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya

“Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Fungsi dan Peruntukannya” merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestarnya pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan seluas ± 2.380.057 Ha atau 56,27% dari luas wilayah Sumatera Barat ± 4.229.730 Ha dengan fungsi kawasan hutan yang terbesar yaitu Hutan Lindung (±791.671 Ha) dan Hutan Produksi (±360.608 Ha) sangat rawan terhadap penyalahgunaan kawasan hutan.



Ketidaktahuan masyarakat terhadap batas kawasan hutan Negara akan menyebabkan kerawanan terjadinya illegal logging dan perambahan sehingga perlu penataan batas kawasan hutan dan pemeliharaan batas kawasan hutan yang telah ditata batas. Instansi atau perusahaan tertentupun yang melakukan kegiatan di luar kehutanan pada kawasan hutan juga memiliki potensi untuk merusak hutan jika mereka tidak mengetahui ketentuan dan aturan mengenai pinjam pakai kawasan hutan. Begitu juga dengan perusahaan yang diberi hak pengelolaan hutan dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI sangat rawan merusak hutan. Bahkan skema Perhutanan Sosial yang memberikan izin kelola hutan kepada masyarakat juga rawan terhadap penyalahgunaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Jika hal ini berlanjut dapat dipastikan keberadaan hutan Sumatera Barat tidak dapat dipertahankan sebagai penyangga ekosistem secara baik. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 disajikan dalam Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya Hutan Tahun 2016

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					100

Dari Tabel 13 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis I pada Tahun 2016 berhasil dicapai dengan baik. Rata-rata capaian sasaran 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 100% diatas adalah seluruh kawasan hutan Sumatera Barat yang diberi hak kelola sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya telah sesuai dengan fungsi, peruntukan dan perizinannya.

Tabel 14. Perbandingan capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya Tahun 2015 dan Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2016	Realisasi	
			2015 (n-1)	2016 (n)
Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100%



Dari Tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator di atas sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Artinya pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Sumatera Barat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100

Tabel 15 di atas memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja "Persentase Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Sesuai Dengan Fungsi Dan Peruntukannya" pada Tahun 2016 sebesar 100% telah mendukung capaian indikator kinerja sesuai target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu 100%. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki sasaran "Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya" dan sasaran ini dapat dicapai dengan memastikan persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya setiap tahunnya hingga periode akhir Renstra yaitu Tahun 2021 adalah tetap 100%.

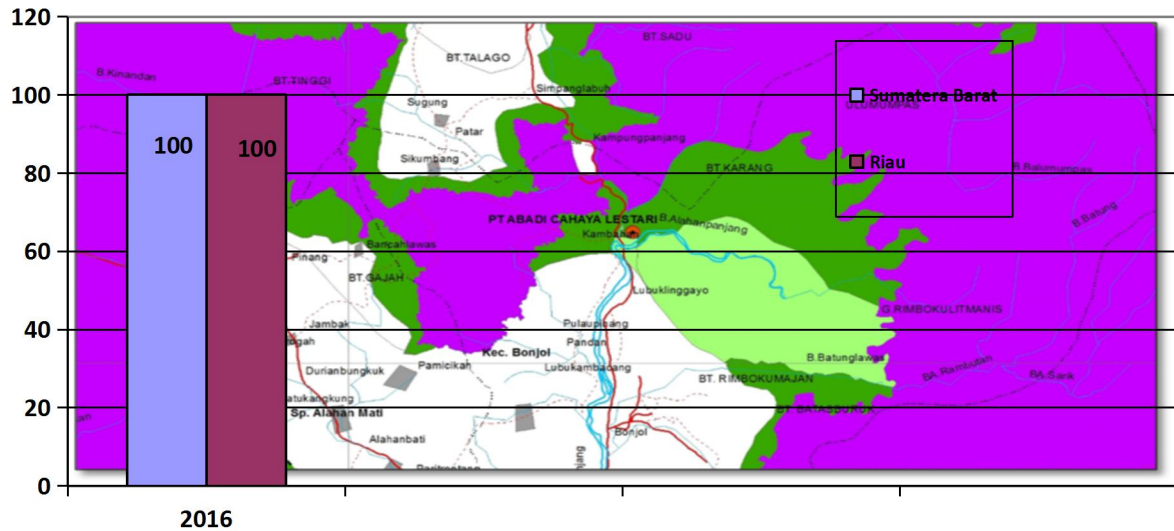
Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2016		Ket
		Sumbar	Riau	
Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	Sama

Dari Tabel 16 dapat dilihat, capaian indikator tersebut di atas dapat direalisasikan oleh Provinsi Sumatera Barat sebesar 100%, sama dengan Provinsi Riau yang dapat memantapkan kawasan hutan sesuai fungsinya seluas 3.041.543 Ha dengan capaian 100%. Perbedaannya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengukur bahwa



pemantapan kawasan hutan dapat di ukur dengan indikator persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dengan nilai 100% sedangkan Riau mengukur pemantapan kawasan hutan sesuai fungsinya dengan indikator penggunaan kawasan hutan sebesar 3.041.543 Ha sebagaimana Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Perbandingan Capaian Indikator Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui dua program yang terdiri atas satu program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN, program dimaksud adalah:

1. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) yang terdiri dari tiga kegiatan masing-masing:
 - a. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan.
 - b. Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu.
 - c. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK yang terdiri satu kegiatan yaitu:
 - a. Planologi dan Tata Lingkungan

Secara keseluruhan kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik, hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran melalui hasil dan capaian indikator kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 17 berikut ini.



Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2016

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
1.	Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Indikator Sasaran: Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	- Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 Km	70 Km	100%	
			Inventarisasi Potensi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	- Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu	3 Judul	3 Judul	100%	
			Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan	- Tersedianya data potensi dan pengembangan jasa lingkungan dan ekowisata	2 Lap	2 Lap	100%	
			Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	- Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukan	13 Kab/kota	13 Kab/kota	100%	
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	- Hasil Planologi dan Tata Lingkungan	3 Lap	3 Lap	100%	

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis I adalah sebagai berikut:

1. Indikator persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya" memiliki target sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini di dukung oleh Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK seperti terlihat pada Tabel 17 di atas.

Indikator Kinerja Utama "Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya" diukur dengan menghitung persentase luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya pada tahun 2016 dengan luas kawasan hutan yang dibebani izin pada tahun 2016. Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah 100%.



Capaian Target IKU persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Tahun 2016 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Capaian Target IKU Persentase Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Sesuai Dengan Fungsi Dan Peruntukannya per Triwulan Tahun 2016.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	0%	70%	100%	100%	0%	0	92.31%	131.87	100%	100	100%	100

Dari Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Bahkan pada Triwulan 2 realisasi telah melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator “Persentase Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya” Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap unit penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, unit pemanfaatan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Alam/ Hutan Tanaman Industri, unit pemanfaatan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang sesuai dengan perijinan yang di berikan atas hak penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pesatnya perkembangan pembangunan kegiatan non kehutanan pada kawasan hutan, pengelolaan hutan melalui IUPHHK-HA/HTI, dan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam skema Perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat, mendorong perlunya dilakukan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan Hutan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan harus dimonitor agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perijinan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan. Pada tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 72 unit penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan seperti pada Tabel 19 di bawah ini.



Tabel 19. Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
1.	Bupati Pasaman Barat	Pembangunan Pelabuhan Umum dan jalan Teluk Tapang – Air Bangis	122.01	HP dan HL	Sesuai
2.	PT. Gamindra Mitra Kesuma	Operasi Produksi Biji Besi dan Jalan Tambang	102.22	HPT	Sesuai
3.	LAPAN	Lokasi pengamatan Atmosfer	17.7	HPT	Sesuai
4.	Bupati Lima Puluh Kota	Pembangunan jalan menuju Transmigrasi Koto Tengah	8.37	HPK	Sesuai
5.	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Pembangunan jalan menuju lokasi Transmigrasi Padang Tarok	14.48	HPK	Sesuai
6.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan jalan ruas Aie Luo – Kipek	4.40	HPT	Sesuai
7.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan jalan ruas Sapan - Air Dingin	0.571	HPT	Sesuai
8.	Bupati Solok	Pembangunan jalan ruas Garabak Data-Batu Bajanjang	11.45	HL Batang Palangki	Sesuai
9.	Bupati Solok	Pembangunan jalan ruas Kapujan - Rimbo Data	11.45	HL Batang Palangki	Sesuai
10.	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Padang Pariaman	Pembangunan Intake dan aringan Pipa Air Bersih	0.0575	HL Barisan I	Sesuai
11.	PT Tripabara	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	187.31	HPT	Sesuai
12.	PT Galian Endapan Buana	Pertambangan galena	153.89	HP	Sesuai
13.	Bupati Kepulauan Mentawai	Pembangunan Instalasi Listrik Biomasa	5.3	HP	Sesuai
14.	PT Semen Padang	Tambang Batu Kapur	242.3	HPT	Sesuai
15.	Walikota Padang	Pembangunan Jalan Baringin- Kalampaian	17.05	HL	HL
16.	PT Allied Indo Coal Jaya	Tambang Batubara	682.39	HP Serasah	HP Serasah
17.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Pembangunan Embung	3.65	HPK	HPK

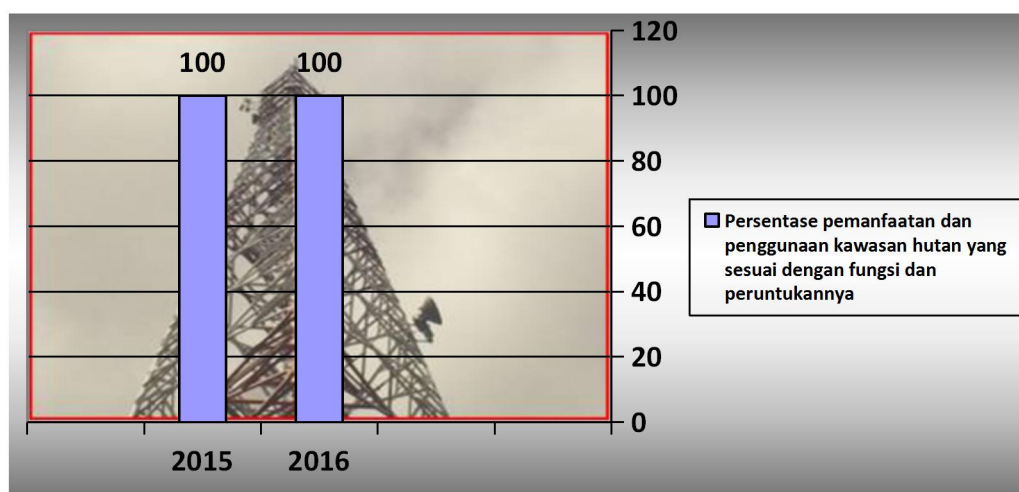


No.	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
18.	LPHN Simanau, LPHN Simancuang, LPHN Sungai Buluah, LPHN Pulakek Koto Baru, LPHN Pakan Rabaa, LPHN Pasir Talang, LPHN Koto Baru, LPHN Sirukam, LPHN Sungai Abu, Sariak Alahan Tigo LPHN Paru, LPHN Ranah Pantai Cermin, LPHN Muaro Takung, LPHN Lubuk Tarantang, LPHN Mangganti, LPHN Air Bangis, LPHN Katiagan, LPHN Sungai Betung, LPHN Aie Angek, LPHN Padang Limau Sundai.	Hutan Nagari (HN)	49,132	HL,HP	Sesuai
19.	HKm Maju Bersama, HKm Gunung Leco, HKm Saiyo, HKm Rap Hita Saiyo, HKm Tombang Pinang, HKm Harapan Baru, HKm Karya Setia, HKm Pangduhu Maju, HKm Sontra, HKm Beringin Sakti, HKm Bukit Lestari, HKm Wana Lestari, HKm Aur Serumpun, HKm Patamuan Saiyo, HKm Pasir Putih, HKm Sungai Tuo, HKm Leter W, HKm Sialangan, HKm Tataye Sakato, HKm Lurah Basuang, HKm Famili Sakato, HKm Talago Bawah Gunuang, HKm Ingin Makmur	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	10,047		Sesuai
20.	KTH Minang Saiyo, KTH Giat Bersama, KTH Mekar Jaya, KSU Air Bangis	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	6,935	Hutan Produksi	Sesuai
JUMLAH			67,698.60		



Dari Tabel 19 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 72 unit/perusahaan yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Sumatera Barat yang terdiri dari 17 unit menggunakan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri, 20 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), 23 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 72 unit/ perusahaan yang memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan tersebut diatas berdasarkan hasil evaluasi tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sesuai aturan yang berlaku.

Merujuk pada hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang sama pada tahun lalu berdasarkan target Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 secara kuantitatif pencapaian IKU Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, terlihat dalam Gambar 3 berikut ini.



Sumber: Hasil pengolahan data primer target IKU sesuai PK 2016

Gambar 3. Pencapaian Target Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa capaian IKU "Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya" setiap tahunnya tercapai dengan kategori keberhasilan sangat baik dan sesuai dengan target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tahun 2016, dalam rangka pencapaian target IKU "Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya" telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 398.726.975,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan



menjadi Rp 372.362.550,- Pada Tahun 2016 ada arahan dari DPKD untuk melakukan penghematan (penundaan kegiatan karena adanya pengurangan DAU tanpa merubah target sasaran) maka alokasi dana untuk mencapai IKU Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya tidak dikurangi. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 352.357.600,- atau 94,63% terhadap alokasi dana perubahan dan terhadap dana pemotongan DAU. Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 20.004.950,- atau 5,37% dari dana yang tersedia. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Jika dilihat dari pencapaian terhadap target sasaran strategis sesuai yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah seperti Tabel 20 berikut ini.

Tabel 20. Pencapaian Terhadap Target Sasaran Strategis I Sesuai Yang Tertuang Pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No.	Sasaran	Indikator	REALISASI	% CAPAIAN
			2016	2016
1.	Terwujudnya Kepastian Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100

Dari Tabel 19 di atas dapat dilihat realisasi dan capaian kedua indikator kinerja utama untuk mengukur capaian Sasaran Strategis I pada Tahun 2016 mencapai target dengan kategori keberhasilan pencapaian target IKU sangat baik.

Permasalahan:

1. Belum seluruhnya kawasan hutan di tata batas dan ditetapkan;
2. Masih adanya konflik kawasan hutan;
3. Pemetaan kawasan hutan secara operasional masih terkendala dengan peta dasar yang tersedia;
4. Masih ada tumpang tindih dan *non prosedural* perizinan.

Solusi:

1. Melakukan sosialisasi batas kawasan hutan;
2. Melakukan identifikasi konflik tenurial;
3. Melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di Kab/Kota.



II. Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal

Tujuan **Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal** dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam** dan diukur dengan dua indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 21 berikut ini.

Tabel 21. Tujuan dan Sasaran Strategis II

TUJUAN 2	SASARAN 2
Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam

“Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal” merupakan hal penting lainnya setelah mantapnya kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan meningkatkan daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam yang dijadikan sasaran strategis untuk mengukur ketercapaian Tujuan 2 di atas.

Daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam dapat dicapai diantaranya dengan menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan melalui beberapa cara diantaranya menjaga hutan dari illegal logging dan kebakaran hutan. Sumatera Barat memiliki kawasan hutan seluas ± 2.380.057 Ha dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: SK.4/V-DAS/2015 tentang Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2015 total lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat adalah 630.695 Ha artinya 26,50% kawasan hutan Sumatera Barat diidentifikasi mengalami penurunan daya dukung ekologi dan ekosistem (kritis).

Angka luas lahan kritis ini lebih besar dibandingkan luas lahan kritis hasil penghitungan lima sebelumnya yaitu seluas 372.386 Ha. Penghitungan luas lahan kritis dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekali lima tahun, hasil penghitungan luas lahan kritis di Sumatera Barat pada Tahun 2013 lebih besar dibandingkan luas lahan kritis hasil penghitungan 2009 disebabkan kriteria lahan kritis yang digunakan sebagai dasar penghitungan luas lahan kritis tahun 2013 berbeda dengan kriteria lahan kritis yang digunakan pada Tahun 2009. Angka perhitungan lahan kritis Tahun 2013 baru *publish* pada tanggal 29 Januari 2015. Setelah perdirjen ini *publish* maka Dinas Kehutanan



Provinsi Sumatera Barat menjadikan data lahan kritis tersebut sebagai acuan untuk penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan

Dengan semakin bertambahnya kerusakan hutan Indonesia setiap tahunnya maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2013 menambah kriteria lahan kritis menjadi lima yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensi kritis dan tidak kritis sedang Tahun 2009 kriteria lahan kritis hanya empat yaitu sangat kritis, kritis dan agak kritis dan tidak kritis. Kriteria potensi kritis inilah yang pada Tahun 2009 tidak diperhitungkan sedang pada Tahun 2013 potensi kritis pun dihitung dengan harapan lahan pada kriteria potensi kritis diperhatikan agar tidak menjadi kritis, inilah salah satu faktor yang menyebabkan luas lahan kritis hasil penghitungan Tahun 2013 lebih besar angkanya dibandingkan dengan luas lahan kritis hasil penghitungan Tahun 2009.

Luas lahan kritis seluas 630.695 Ha yang ada di Sumatera Barat ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Sumatera Barat yang dalam hal ini merupakan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan angka ini. Selain menurunkan luas lahan kritis sasaran "Meningkatnya Daya Dukung Hutan Dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam" dicapai dengan meningkatkan persentase jumlah kasus illegal yang tertangani dan meningkatkan Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka periode tahun sebelumnya (2011-2015).

Tabel 22. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Hutan Dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun 2016

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	0,18 %	0,18%	100
		Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100%	100%	100
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	5%	82,88	1.657,60
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					618,80

Dari Tabel 22 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis II pada Tahun 2016 berhasil dicapai dengan sangat baik. Rata-rata capaian sasaran 618,8% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Capaian kinerja Sasaran Strategis II yang sangat tinggi bukan dikarenakan kesalahan penetapan target kinerja. Hal ini lebih disebabkan karena salah satu IKU pada Sasaran Strategis II yaitu "Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)"



merupakan indikator yang bersifat situasional dan sangat tergantung pada keadaan iklim, disamping sudah makin membaiknya sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan (bersifat preventif) sampai tingkat tapak (masyarakat).

Sasaran kinerja ini cenderung kualitatif mengingat beberapa indikator yang dipakai memiliki parameter yang bersifat kasuistis (situasional) dan tergantung pada faktor yang tidak dapat dikontrol oleh perencanaan.

Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Hutan Dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun 2015 dan Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2016	Realisasi	
			2015 (n-1)	2016 (n)
Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	0,18%	-	0,18%
	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100%	-	100%
	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	5%	725	1.657,60

Dari Tabel 23 di atas, dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka satu diantara tiga indikator kinerja diatas capaian Tahun 2016 lebih kecil. Namun dapat dijelaskan untuk indikator kinerja yang capaiannya lebih rendah yaitu "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" ada perbedaan cara penghitungan pencapaian target indikator kinerja antara Tahun 2015 dengan Tahun 2016. Pada Tahun 2015 penghitungan penurunan luas lahan kritis dilakukan dengan membagi angka penanaman pada tahun 2015 dengan luas lahan kritis yang ditetapkan pada Tahun 2009 yaitu 372.386 Ha dikalikan dengan angka 100%. Sedangkan pada Tahun 2016 sesuai arahan tim evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB maka penurunan lahan kritis dihitung dengan membagi jumlah tanaman yang tumbuh hasil penanaman Tahun 2011 (n-5) kemudian dikonversikan ke luas lahan (Ha) dengan luas lahan kritis yang ditetapkan pada Tahun 2015 yaitu seluas 630.695 Ha dikalikan dengan angka 100%. Perbedaan cara hitung ini dimungkinkan karena Tahun 2016 merupakan tahun pertama RPJMD Sumbar 2016-2021 dan Rentra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 sehingga dimungkinkan untuk adanya perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun cara penghitungan capaian IKU antara Tahun 2015 dengan Tahun 2016 hal ini menjadi penyebab angka realisasi kinerja pada Tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan realisasi kinerja pada Tahun 2016. Namun secara capaian target untuk Tahun 2016,



indikator kinerja "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" sesuai dengan target dengan capaian kinerja 100%.

Indikator "Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" capaian kinerja Tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2015 hal ini disebabkan pada Tahun 2016 kondisi cuaca dan iklim di Sumatera Barat tidak terlalu panas. Indikator "Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani" capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2015 disebabkan indikator kinerja Tahun 2016 merupakan indikator baru yang merupakan hasil penyempurnaan IKU pada saat evaluasi SAKIP Tahun 2015 oleh KemenPAN-RB.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Hutan Dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi 2016	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	1,71%	0,18%	10,58
	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100%	100%	100
	Persentase penurunan jumlah titik panas (<i>hot spot</i>) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	30%	82,88%	276,27

Tabel 24 di atas memperlihatkan bahwa satu diantara tiga indikator kinerja di atas tidak memenuhi tingkat kemajuan yang baik yaitu indikator kinerja "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis". Sebaiknya tingkat kemajuan capaian indikator kinerja pada tahun pertama RPJMD atau Renstra minimal adalah 16,67% dari capaian kinerja akhir RJMD dan Renstra karena RPJMD Sumatera Barat dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periodenya enam tahun yaitu 2016-2021, sedangkan tingkat kemajuan indikator kinerja "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" hanya 10,58%. Hal ini disebabkan penanaman Tahun 2011 luasannya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya. Namun capaian kinerja "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" sesuai dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2016 dengan capaian 100%.

Indikator "Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani" tercapai 100% dengan tingkat kemajuan 100%. Namun tidak berarti capaian pada Tahun 2016 yang telah mencapai target akhir Renstra mengakibatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini



tidak perlu lagi di capai pada Tahun 2017-2021 karena target akhir Renstra dicapai jika mulai Tahun 2016 hingga Tahun 2017 capaian IKU ini tetap 100%. Artinya setiap tahun seluruh kasus illegal logging yang laporannya sampai kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat di tangani.

Sementara untuk indikator "Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2016 sudah melebihi target RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Namun jika pada tahun selanjutnya jumlah titik panas meningkat secara signifikan maka tidak menutup kemungkinan akan mengurangi pencapaian target pada akhir periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Untuk itu capaian kinerja indikator ini setiap tahunnya harus tetap dicapai dengan baik.

Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Hutan dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

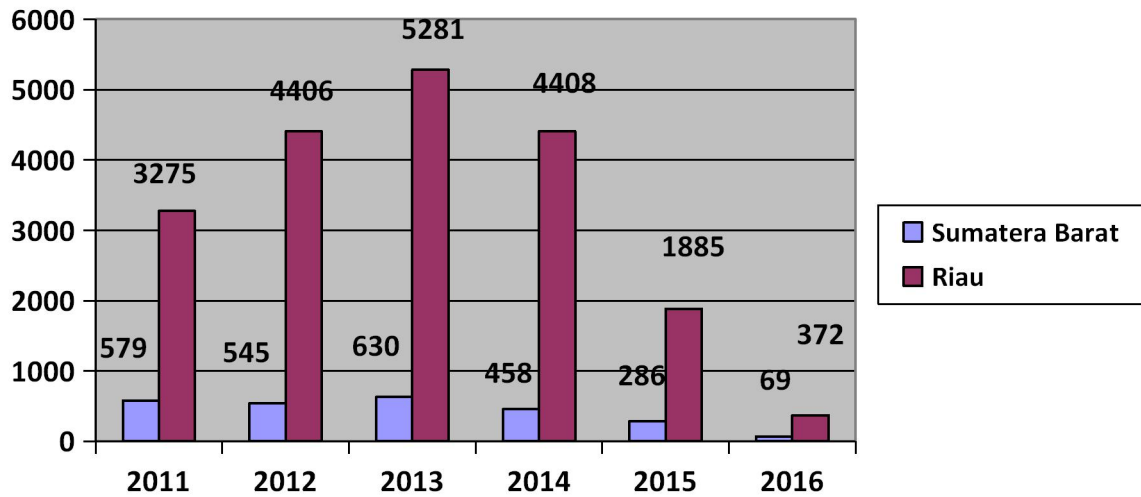
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2016		Ket
		Sumbar	Riau	
1	2	3		
Meningkatnya Daya Dukung Hutan Dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	0.18%	-	-
	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100%	100%	Sama
	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	82.88%	90,34%	Lebih Rendah

Dari Tabel 25 terlihat bahwa dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran "Terpeliharanya Ekosistem dan Kualitas Lahan" di atas ada 2 indikator yang dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Riau yaitu indikator kinerja "Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" dan "Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani". Sedangkan untuk indikator persentase penurunan lahan kritis tidak bisa dibandingkan karena ada perbedaan dalam menentukan formula penghitungan pencapaian target indikator.

Capaian kinerja terhadap indikator "Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" Provinsi Riau lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat namun capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat telah melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2016. Indikator ini bersifat situasional sehingga capaian kinerja lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam. Capaian kinerja

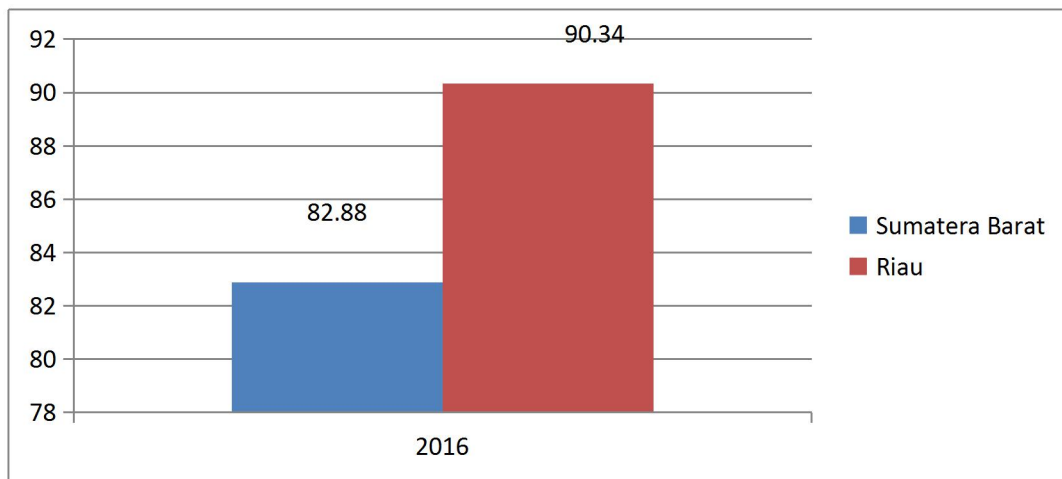


indikator "Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Jumlah titik panas (*hot spot*) pada enam tahun terakhir yang terpantau melalui satelit NOAA pada Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.

Capaian kinerja indikator "Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Capaian kinerja indikator "Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau



Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui lima program yang terdiri atas empat program dengan pembiayaan APBD dan satu Program dengan pembiayaan APBN, Program dimaksud adalah:

1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu:
 - a. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan
 - b. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
 - c. Konservasi Sumberdaya Genetik
2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam yang terdiri dari sembilan kegiatan yaitu:
 - a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - b. Pengembangan Sarana Konservasi Tanah
 - c. Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL
 - d. Pembinaan Monitoring Pengelolaan DAS
 - e. Rehabilitasi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
 - f. Rehabilitasi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK)
 - g. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK+APBD)
 - h. Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 + APBD)
 - i. Peningkatan Sarana Prasarana Operasional KPHL Bukit Barisan (DAK 2016)
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang terdiri dari enam kegiatan yaitu:
 - a. Pengamanan dan Perlindungan Hutan
 - b. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
 - c. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Jasa Lingkungan
 - d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
 - e. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 - f. Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
4. Program Pengendalian Kebakaran Hutan yang terdiri dari satu kegiatan yaitu:
 - a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK yang terdiri dari 1 kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi dengan tiga sub komponen yaitu:
 - a. Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
 - b. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
 - c. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - d. Pengendalian Perubahan Iklim

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 26 berikut ini.



Tabel 26. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Hutan dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun 2016

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
2.	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam Indikator Sasaran: 1. Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis 2. Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani 3. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	- Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas	200.000 batang	200.000 batang	100%	
			Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	- Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman	13 Kab/kota	13 Kab/kota	100%	
			Konservasi Sumber Daya Genetik	- Terpeliharanya dan teridentifikasinya sumber daya genetik tanaman hutan	4 Lokasi	4 Lokasi	100%	
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	- Terehabilitasinya lahan kritis di daerah penyangga Hutan Desa/HKm	65 Ha	65 Ha	100%	
			Pengembangan Sarana Konservasi tanah	- Terbangunnya bangunan konservasi tanah	2 unit	2 unit	100%	
			Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL	- Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/DAK oleh Kab/Kota	18 Kab/kota	18 Kab/kota	100%	
			Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS	- Tersedianya Buku Himpunan Peraturan Pengelolaan DAS	7 Pergub	7 Pergub	100%	
			Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan	- Tersediannya dokumen rancangan Kegiatan RHL dan terbinanya pelaksanaan pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh pemegang Izin	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
			Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK luncuran)	- Terlaksananya penanaman Rotan dan Pembangunan Bank Buah	50 Ha	50 Ha	100%	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 dan Pendukung)	- Terlaksananya Pembangunan Hutan Tanaman Jabon dan Pemeliharaan I Tanaman Jabon pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan	60 Ha dan 35 Ha	60 Ha dan 35 Ha	100%	
			Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 +	- Terlaksananya Pengayaan Hutan Lindung dan reboisasi pengayaan	125 Ha dan 35 Ha	125 Ha dan 35 Ha	100%	



No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
			Pendukung)	lanjutan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan				
			Peningkatan Sarana Prasarana Operasional KPHL Bukit Barisan (DAK 2016)	- Tersedianya sarana prasarana operasional KPHL Bukit Barisan	1 Paket	1 Paket	100%	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	- Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prefresif/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi	6 laporan	6 laporan	100%	
			Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	- Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	1 kab	1 kab	100%	
			Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	- Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/perambahan	4 lokasi	4 lokasi	100%	
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	- Terlaksananya pelatihan Tenaga PPHBN dan Penguatan Lembaga PPHBN serta Sosialisasi Perda peran Serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan	80 orang	80 orang	100%	
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Terlaksananya pengumpulan data PEP RAD-GRK sektor berbasis kehutanan	1 lap	1 lap	100%	
			Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan	- Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar kawasan hutan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan	2 Lap	2 Lap	100%	
			Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan	33 kali	33 kali	100%



No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket	
				dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)					
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	- Hasil pengendalian DAS dan Hutan Lindung	7 Lap	7 Lap	100%	APBN	
					- Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3 Lap	3 Lap	100%	
					- Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Lap	1 Lap	100%	
					- Pengendalian Perubahan Iklim	4 Lap	4 Lap	100%	

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis II adalah sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" memiliki target sebesar 0,18%, terealisasi sebesar 0,18% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini di dukung oleh Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK seperti terlihat pada Tabel 25 di atas.

Indikator Kinerja Utama "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" diukur dengan rumus angka 0.8 dikalikan angka jumlah tanaman yang ditanam pada tahun 2011 (setelah dikonversikan ke luas dalam satuan hektar dibagi dengan luas lahan kritis dikalikan angka 100%. Angka 0,8 adalah asumsi tanaman yang baik pertumbuhannya 80% dari jumlah yang ditanam pada Tahun 2011. Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis targetnya adalah 0,18%.

Capaian Target IKU persentase Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis Tahun 2016 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 26 berikut ini.



Tabel 27. Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis per Triwulan Tahun 2016.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi								
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%	
Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	a. Persentase penurunan luas lahan kritis	0%	0%	0,18%	0,18%	0%	0	0%	0	0%	0	0	0,18	100

Dari Tabel 27 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan kecuali pada triwulan III seharusnya indikator kinerja ini sudah tercapai 100% pada triwulan III namun karena ada satu sub komponen kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini masuk dalam anggaran perubahan APBD 2016 maka capaian kinerja indikator "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" dapat direalisasikan pada triwulan IV.

Untuk mencapai target kinerja indikator "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanaman yang dilakukan pada Tahun 2011. Hal ini sesuai dengan saran tim Kemenpan-RB yang menyarankan agar penurunan lahan kritis dilakukan dengan menghitung luasan kawasan hutan dan lahan hasil reboisasi di dalam dan di luar kawasan hutan dan lahan pada lima tahun yang lalu, mengingat lahan kritis tidak mungkin tertangani pada saat penanaman. Pohon dengan umur lima tahun dianggap telah memiliki kanopi tajuk yang cukup untuk berkontribusi menangani pengurangan lahan kritis. Untuk itu indikator kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis Tahun 2016 dihitung dengan menghitung luasan hasil penanaman pada Tahun 2011 seperti pada Tabel 28 di bawah ini:

Tabel 28. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Penanaman Tahun 2011

No.	Kab/ Kota	Luas Penanaman di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan pada Tahun 2011 (Ha)	Luas Tanaman yang Tumbuh di Tahun 2011 (Ha)	Luas Tanaman yang tumbuh Hasil evaluasi Penanaman Tahun 2011 di Tahun 2016 (Ha)
1.	Kabupaten Tanah Datar	750	450	270
2.	Kabupaten Agam	450	270	216.27
3.	Kabupaten Lima Puluh Kota	150	90	59.022
4.	Kabupaten Solok Selatan	150	90	68.571
5.	Kabupaten Solok	200	120	113.28
6.	Kabupaten Pasaman Barat	200	120	84
7.	Kota Sawah Lunto	75	45	31.5



No.	Kab/ Kota	Luas Penanaman di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan pada Tahun 2011 (Ha)	Luas Tanaman yang Tumbuh di Tahun 2011 (Ha)	Luas Tanaman yang tumbuh Hasil evaluasi Penanaman Tahun 2011 di Tahun 2016 (Ha)
8.	Kabupaten Sijunjung	246	147.6	180.564
9.	Kabupaten Pasaman	170	102	73.5624
10.	Kota Solok	75	45	37.575
JUMLAH		2466	1479.6	1134.34

Dari Tabel 28 terlihat bahwa penanaman yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD dan DAK Tahun 2011 adalah seluas 2.466 Ha dan jika dengan asumsi dari penanaman tersebut tumbuh hanya 60% maka diperoleh jumlah tanaman yang tumbuh pada Tahun 2011 adalah 1.479,6 Ha. Pada Tahun 2016 dilakukan monitoring dan evaluasi hasil penanaman Tahun 2011 tersebut dan diperoleh dari 1.479,6 Ha hasil penanaman yang tumbuh pada Tahun 2011 luas hutan dan lahan yang ditumbuhi tanaman hutan hasil penanaman Tahun 2011 adalah 1.134,34 Ha. Jika angka 1.134,34 Ha kita bagi dengan angka luas lahan kritis yaitu 630.695 Ha kemudian untuk mengetahui persentasenya kita kalikan dengan angka 100% maka diperoleh angka 0,18%. Angka 0,18% inilah yang menjadi hasil capaian indikator "Persentase penurunan luas lahan kritis". Artinya dengan diketahui jumlah pohon yang masih hidup dan tumbuh baik hingga Tahun 2016 dari hasil penanaman lima tahun yang lalu yaitu 1.134,4 Ha (setelah dikonversikan ke luas dengan satuan hektar) maka dapat diketahui bahwa hasil penanaman lima tahun yang lalu tersebut dapat mengurangi luas lahan kritis pada Tahun 2016 karena pohon dengan usia lima tahun dianggap telah mampu melaksanakan fungsinya sebagai penyangga ekologi dan ekosistem dengan baik.

Tahun 2016, dalam rangka pencapaian target IKU Persentase penurunan luas lahan kritis telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 5.385.043.300,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 4.930.093.450,- Pada Tahun 2016 ada arahan dari DPKD untuk melakukan penghematan (penundaan kegiatan karena adanya pengurangan DAU tanpa merubah target sasaran) maka alokasi dana untuk mencapai IKU Persentase penurunan luas lahan kritis telah dikurangi sebesar Rp 188.052.360,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai IKU ini adalah sebesar Rp 4.742.041.090,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 4.276.730.150,- atau 86,75% terhadap alokasi dana perubahan dan 90,19% terhadap dana pemotongan DAU. Maka Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 653.363.300,- atau 13,25% dari dana yang perubahan tersedia dan sebesar Rp 465.310.940,- atau 9,81% dari dana pemotongan DAU. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.



2. Indikator Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani" memiliki target sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini di dukung oleh Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK seperti terlihat pada Tabel 25 di atas.

Indikator Kinerja Utama "Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani" diukur dengan menghitung jumlah kasus illegal logging/tindak pidana kehutanan yang tertangani pada tahun 2016 dibagi dengan jumlah kasus illegal logging/tindak pidana kehutanan yang dilaporkan pada tahun 2016 dikalikan angka 100%. Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani pada Tahun 2016 targetnya adalah 100%.

Capaian Target IKU Persentase Jumlah Kasus Illegal logging yang Tertangani Tahun 2016 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti yang terdapat pada Tabel 29 berikut ini.

Tabel 29. Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis per Triwulan Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	b. Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100

Dari Tabel 29 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target indikator "Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani" merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan seperti patroli simpatik pengamanan hutan, penyusunan perda pengamanan dan perlindungan hutan, penyidikan dan pengamanan hutan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan perlindungan hutan melalui kerangka PPHBN (Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Masyarakat).

Berdasarkan rekapitulasi data penanganan kasus selama Tahun 2016, kasus yang ditangani adalah 40 kasus atau turun 7,30% dari jumlah kasus pada Tahun 2015.

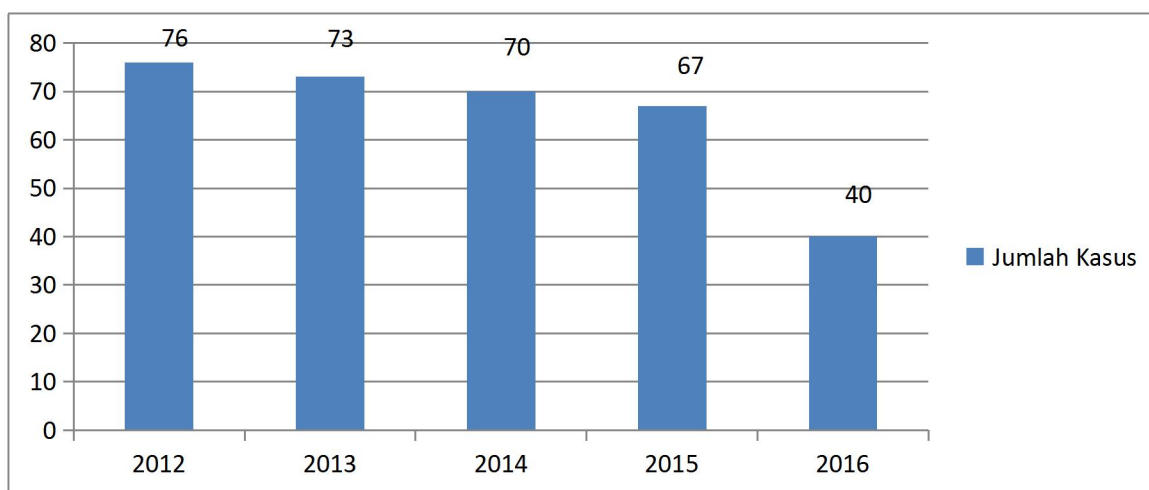


Secara terperinci perkembangan kasus illegal logging di Sumatera Barat pada Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 30 berikut ini.

Tabel 30. Perkembangan Kasus Illegal Logging/Tindak Pidana Bidang Kehutanan Tahun 2016

No.	KABUPATEN	KASUS	BB KAYU (M ³)	BB LAIN			PERKEMBANGAN KASUS						Ket
				BB LAIN	Betor/R2	Chainsaw	lidik	Sidik	Kejaksaan	Pengadilan	Vonis	Lelang	
1	PASAMAN BARAT	4	7,7875	2	3	1	3	1	-	-	-	-	
2	PASAMAN	5	21,1109	1	-	-	5	-	-	-	-	-	
3	LIMA PULUH KOTA	3	15,0598	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
4	AGAM	4	11,1953	1	-	-	1	1	1	-	1	-	
5	TANAH DATAR	4	11,7771	-	-	-	-	2	-	-	2	-	
6	SOLOK	6	14,4206	2	-	-	1	1	1	-	3	-	
7	SOLOK SELATAN	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	SIJUNJUNG	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	DHARMASRAYA	4	16,0000	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
10	PESISIR SELATAN	6	19,5581	-	-	-	2	1	-	-	3	-	
11	KEP.MENTAWAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	PD.PARIAMAN	2	2,2327	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
13	KOTA PADANG	1	1.0000	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
14	KOTA BUKITTINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	KOTA SAWAHLUNTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	KOTA SOLOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	KOTA PARIAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	KOTA PD.PANJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	KOTA PAYAKUMBUH	1	25,6000	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
Jumlah		40	145,7420	11	1	1	15	7	2	-	16	-	

Dari Tabel 30 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kasus illegal logging masih dalam proses lidik. Kasus yang dapat diselesaikan hingga pengadilan tidak ada dan 16 kasus telah divonis. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2012 sampai tahun 2016, jumlah kasus yang ditangani setiap tahun mengalami penurunan hal ini merupakan hasil koordinasi yang baik antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan instansi penegak hukum terkait seperti terlihat pada Gambar 6 berikut ini.



Gambar 6. Perkembangan Jumlah Kasus Illegal Logging yang Ditangani Lima Tahun Terakhir

Dari Tabel 30 diketahui bahwa dari 40 kasus illegal logging yang dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik itu laporan dari masyarakat maupun hasil koordinasi dengan pihak lain terkait seperti kepolisian seluruhnya ditangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangan. Dari 40 kasus tersebut seluruhnya ditemukan barang bukti berupa kayu tangkapan sejumlah 145,7420 M3. Indikator kinerja Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani tercapai 100% karena dari 40 kasus yang dilaporkan seluruhnya ditangani sesuai prosedur sesuai kewenangan sampai pada tahapan yang tertuang pada Tabel 29 di atas.

Seluruh kasus yang ditindak lanjuti pada Tahun 2016 merupakan hasil positif sebagai upaya untuk menekan kerusakan hutan akibat dari penebangan hutan illegal. Untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dalam sasaran ini, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya yang paling efektif adalah pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengamanan dan perlindungan hutan. Melalui Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2011 hingga Tahun 2016 telah berhasil membentuk 159 kelompok PPHBN yang tersebar di 159 Nagari yang terdiri dari 620 personil satgas seperti pada Tabel 31 berikut ini.

Tabel 31. Jumlah Kelompok Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2016 di Sumatera Barat

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH NAGARI	JUMLAH ANGGOTA PPHBN (Org)
1.	SOLOK SELATAN	23	30
2.	SOLOK	20	80
3.	KEP. MENTAWAI	8	32
4.	PADANG PARIAMAN	9	31



NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH NAGARI	JUMLAH ANGGOTA PPHBN (Org)
5.	50 KOTA	9	20
6.	AGAM	6	38
7.	PESISIR SELATAN	12	45
8.	SIJUNJUNG	7	35
9.	PASAMAN	33	173
10.	TANAH DATAR	6	37
11.	PASAMAN BARAT	5	22
12.	SAWAHLUNTO	18	57
13.	DHARMASRAYA	1	10
14.	KOTA SOLOK	2	10
	JUMLAH	159	620

Tahun 2016, dalam rangka pencapaian target IKU Persentase Jumlah Kasus Illegal Logging yang Tertangani telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 997.500.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 968.003.000,- Pada Tahun 2016 ada arahan dari DPKD untuk melakukan penghematan (penundaan kegiatan karena adanya pengurangan DAU tanpa merubah target sasaran) maka alokasi dana untuk mencapai IKU Jumlah Kasus Illegal Logging yang Tertangani telah dikurangi sebesar Rp 147.951.300,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai IKU ini adalah sebesar Rp 820.051.700,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 735.116.285,- atau 75,94% terhadap alokasi dana perubahan dan 89,64% terhadap dana pemotongan DAU. Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 232.886.715,- atau 24,06% dari dana perubahan yang tersedia dan sebesar Rp 84.935.415,- atau 10,36% dari dana pemotongan DAU. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

3. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)

Indikator Kinerja Utama (IKU) " Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) memiliki target sebesar 5%, terealisasi sebesar 82,88% dengan tingkat capaian 1.657,60% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini di dukung oleh Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK seperti terlihat pada Tabel 26 di atas.



Indikator Kinerja Utama " Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" diukur dengan menghitung (penurunan titik panas (*hot spot*) di Tahun 2016 dibagi jumlah rerata titik panas (*hot spot*) pada periode lima tahun sebelumnya (2011-2015)) dikalikan angka 100%. Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) pada Tahun 2016 targetnya adalah 5%.

Capaian Target IKU Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) Tahun 2016 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 32 berikut ini.

Tabel 32. Capaian Target IKU Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) Tahun 2016 setiap triwulannya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	c. Persentase penurunan jumlah titik panas (<i>hot spot</i>) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	0%	3%	4%	5%	0%	0	80.34%	2.678	29.48%	737	82,88%	1.657,60

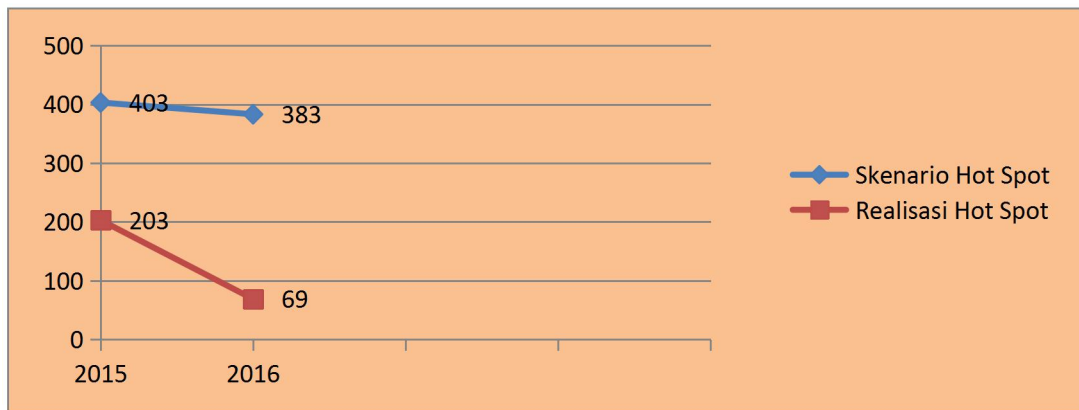
Dari Tabel 32 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai melebihi target triwulan yang ditetapkan. Pada Tahun 2016 tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan dalam skala yang besar, upaya pengawasan dan pencegahan dini yang optimal dilakukan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran hutan dan Lahan (SATGAS DAMKARHUTLA) maupun pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian target indikator sasaran ini. Pengaruh iklim dan curah hujan sangat mempengaruhi capaian indikator kinerja ini.

Koordinasi yang dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kehutanan menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota senantiasa menyiapkan diri dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut baik dalam upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan walaupun



dengan segala keterbatasan Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana yang ada.

Hasil Pantauan titik api (*hot spot*) di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan sangat terpengaruh dengan kondisi musim/iklim yang erat kaitanya dengan Isu Pemanasan Global yang mendorong adanya wacana dalam perdagangan karbon (*Carbon Trade*). Skenario penurunan titik panas (*hotspot*) dimulai dengan angka 403, angka ini merupakan angka rerata titik hotspot tahun 2011-2015. Selanjutnya sesuai target indikator sasaran yaitu penurunan titik panas (*hot spot*) sebanyak 5% dari angka tahun sebelumnya maka didapatkan angka toleransi titik panas (*hotspot*) untuk Tahun 2016 dalam bentuk skenario hotspot seperti Gambar 7 berikut ini.



Gambar 7. Angka *Toleransi* Titik Panas (*Hot Spot*) dan *Realisasi Hot Spot* Tahun 2015-2016

Dari Gambar 7 di atas dapat dilihat pada Tahun 2016 titik api mengalami penurunan dari 203 titik api di Tahun 2015 menjadi 69 titik api di Tahun 2016 hal ini disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca yang terjadi sepanjang Tahun 2016 disamping usaha-usaha pencegahan dan deteksi dini seperti pemasangan larangan pembakaran hutan, lahan dan kebijakan pembukaan kebun tanpa bakar. Dari periode lima tahun yaitu dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 rata-rata jumlah titik panas (*hot spot*) yang terjadi di Sumatera Barat adalah 403 titik api. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015) adalah menurunkan jumlah titik api sebanyak 5% dari rerata jumlah titik api pada periode 2011-2015 (403 titik api) tersebut. Berdasarkan skenario penurunan titik api yang terlihat pada Gambar 7. penurunan titik api sebanyak 5% dicapai jika jumlah titik api pada Tahun 2016 adalah 383 titik api, namun ternyata pada Tahun 2016 titik api berhasil diturunkan hingga 82,88% atau 69 titik api.



Jumlah titik api berdasarkan satelit NOAA yang berhasil dipantau oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 33 berikut ini.

Tabel 33. Jumlah Hot Spot (Titik Api) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 berdasarkan Pantauan Satelit NOAA

NO	KABUPATEN	BULAN												JLH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	
1	AGAM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	DHARMASRAYA	0	2	1	0	0	4	5	3	1	2	0	0	18
3	KEP MENTAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	LIMA PULUH KOTA	0	0	1	0	0	1	3	3	1	0	0	0	9
5	PADANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PARIAMAN	0	0	0	0	0	1	2	4	0	2	0	0	9
7	PASAMAN	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3
8	PESISIR SELATAN	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	6
9	SIJUNJUNG	0	0	0	0	0	4	2	2	2	0	0	0	10
10	SOLOK	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	5
11	SOLOK SELATAN	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	6
12	TANAH DATAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KOTA BUKITTINGGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KOTA PADANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KOTA PD PANJANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KOTA PARIAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KOTA PAYAKUMBUH	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
18	KOTA SAWAHLUNTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
19	KOTA SOLOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1	3	2	0	0	20	21	14	4	4	0	0	69

Dari Tabel 33 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pasaman merupakan kabupaten dengan jumlah hotspot tertinggi. Umumnya lokasi terjadinya titik api berada pada lahan diluar kawasan hutan dan ada beberapa titik yang berada dalam kawasan hutan. Titik api yang terjadi diluar kawasan hutan merupakan akibat masyarakat yang melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar hutan.



Pembukaan lahan (*Land Clearing*) dengan cara membakar hutan masih menjadi primadona untuk pembukaan lahan tanpa memerlukan biaya tinggi.

Jika dilihat perkembangan *hot spot* per bulan, pada saat musim penghujan jumlah hotspot relatif rendah, hal ini dapat dilihat mulai bulan September hingga Desember titik panas (hotspot) mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jumlah hotspot mengalami peningkatan pada musim kemarau pada puncaknya yaitu pada bulan Juli. Dengan melihat data tersebut di atas maka kesiapsiagaan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik panas (hotspot) pada tahun yang akan datang jika trend musim kemarau sama dengan tahun 2016 sudah harus dimulai pada awal tahun dan harus lebih intensif pada bulan-bulan di musim kemarau.

Pemantauan *hot spot* (titik panas) merupakan upaya awal untuk mendeteksi kebakaran hutan secara dini. Luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada Tahun 2016 seluas 661 Ha atau turun 11,39% dari luas kebakaran tahun lalu seperti dapat dilihat pada Tabel 34 berikut ini.

Tabel 34. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Barat Tahun 2016

No.	KAB/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ NAGARI/ KEL	BULAN	LUAS (Ha) KAWASAN						JML	KET
					KSA	HL	HPT	HP	HPK	APL		
1.	PADANG	KURANJI	GUNUNG SARIAK	Januari	-	-	-	-	-	11	11	Lokasi kebakaran adalah di Bukit Lolo Ketek dan Bukit Guo Ladang/Kebun Masyarakat serta lahan tinggal yang ditubuhi ransam dan ilalang.
		KAMP. JUANAN XX	LUBUK BEGALUNG	Januari	-	-	-	-	-	2	2	Lokasi Kebakaran di Bukit Batu Jarang/Bukit Novita Kebun Masyarakat, Ilalang, serta Semak belukar.
2.	PASAMAN BARAT	AUR KUNING	PASAMAN	Maret	-	-	0,5	-	-	-	0,5	Lokasi di Jorong Pinagar kebakaran diduga aktifitas masyarakat pembukaan hutan di Tanami jagung.
		TALAMAU	SINURUIK	Maret	-	3,5	-	-	-	-	3,5	Lokasi Kampung Bateh Samuik Jorong Tombang, kebakaran diduga dilakukan oleh oknum masyarakat yang melakukan pembukaan ladang baru tebang, kering lalu di bakar. Informasi dari masyarakat sekitar kebakaran rencana akan di Tanami Jagung.
		SUNGAI AUA	SUNGAI AUA	Maret	-	-	-	-	-	150	150	Terbakar adalah kebun Sawit Plasma Masyarakat yang berbatasan



No.	KAB/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ NAGARI/K EL	BULAN	LUAS (Ha) KAWASAN						JML	KET
					KSA	HL	HPT	HP	HPK	APL		
												langsung dengan PT. Argo Wiratama. Lokasi adalah lahan Gambut yang sulit dipadamkan.
3.	KAB. SOLOK	LEMBAH GUMANTI	ALAHAN PANJANG	Juni	-	30	-	-	-	-	30	Lokasi terbakar adalah Hutan Lindung Lembah Gumanti Alahan Panjang, Hutan Tanaman Reboisasi tahun 1978/1979. Hutan Tanaman Pinus yang di selingi Ilalang, semak belukar, ransam. Api Diduga adanya kegiatan masyarakat berladang di sekitar hutan lindung membersihkan lahan/ladang dengan cara membakar, tiupan angin sangat kencang menyebabkan api merambat ke hutan lindung.
4.	KAB. PASAMAN	RAO UTARA	LANGUANG	Juli	-	-	-	51,5	-	-	51,5	Kebakaran Diduga pembukaan lahan oleh oknum masyarakat untuk di Tanami pada ladang dan pohon karet, tradisi ladang berpindah-pindah ini sudah berlangsung lama.
		MAPAT TUNGGUL SELATAN	SILAYANG	Agustus	-	50	-	-	-	-	50	Lokasi kebakaran adalah Bukit Jorong Bangkok yang di tumbuh ilalang yang sangat luas, pada musim kemarau sering sekali terjadi kebakaran ilalang dan kebun karet masyarakat.
		RAO SELATAN	LUBUK LAYANG	Septem ber	-	-	-	-	-	30	30	Lokasi Karhut Jorong Abam, Hutan Tanaman Reboisasi 1981/1982 Hutan Pinus, Pohon Karet, Semak belukar. Api Diduga dari punting Rokok karena lokasi berada di pinggir jalan raya Jorong Abam.
5.	KAB. SIJUNJU NG	KUPITAN	PADANG SIBUSUAK	Agustus	-	-	-	-	-	7,5	7,5	Buka lahan dengan modus tebang kering lalu di bakar, api merembet ke lokasi ladang orang.
		SUMPUR KUDUS	SUMPUR KUDUS SELATAN	Oktober	-	5	-	-	-	-	5	Hutan Lindung Pembukaan Kebun Baru di



No.	KAB/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ NAGARI/ KEL	BULAN	LUAS (Ha) KAWASAN						JML	KET
					KSA	HL	HPT	HP	HPK	APL		
												duga oleh oknum Masyarakat setempat. Penutupan lahan perbukitan dengan kemiringan ± 30°, pelaku tidak ditemukan dilapangan.
6.	KAB. LIMA PULUH KOTA	ARAU	TARANTAN G SOLOK BIO-BIO TARAM	Oktober	250	20	-	-	-	30	300	Lokasi terbakar adalah Bukit Cadas bebatuan yang terjal, api diduga berasal dari perladangan masyarakat yang lokasinya di bawah KSA yaitu APL.
7.	KOTA SAWAHL UNTO			Oktober	-	-	-	20	-	-	20	Hutan Pinus/Tanaman Reboisasi Tahun 1981/1982. Api di Duga berasal dari adanya kegiatan perladangan di sekitar lokasi kebakaran hutan.
	JUMLAH				250	105,5	0,5	71,5	-	230,5	661	



Gambar 8. Kebakaran Hutan di Kota Sawahlunto

Tahun 2016, dalam rangka pencapaian target IKU "Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) Dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 253.170.000,- dan tidak mengalami perubahan pada anggaran perubahan, tetapi dikurangi dalam rangka memenuhi kebijakan pemotongan DAU



sebesar Rp 13.810.000,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai IKU ini adalah sebesar Rp 239.360.000,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 220.608.650,- atau 87,14% terhadap alokasi dana perubahan dan 92,17% terhadap dana pemotongan DAU. Maka Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 32.561.350,- atau 12,86% dari dana perubahan tersedia dan sebesar Rp 18.751.350,- atau 7,83% dari dana pemotongan DAU. Efisiensi anggaran tersebut di atas adalah dari perjalanan dinas dalam rangka pemadaman kebakaran hutan yang tidak direalisasikan karena jumlah kebakaran hutan Sumatera Barat pada Tahun 2016 tidak banyak. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 1.657,60% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Tahun 2016, dalam rangka pencapaian target IKU Sasaran Strategis Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 6.635.713.300,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 6.151.266.450,-. Dalam rangka memenuhi kebijakan pemotongan DAU alokasi dana untuk pencapaian target IKU ini dipotong sebesar Rp 349.813.660,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai IKU ini adalah sebesar Rp 5.801.453.790,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 5.232.455.085,- atau 85,06% terhadap alokasi dana perubahan dan 90,19% terhadap dana pemotongan DAU. Maka Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 918.811.365,- atau 14,94% dari alokasi dana perubahan dan sebesar Rp 568.997.705,- atau 9,81% dari dana pemotongan DAU. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target Sasaran Strategis Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam yaitu sebesar 619,2% dari target yang ditetapkan dengan predikat pencapaian sangat baik

Permasalahan :

1. Pengumpulan Data penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan pada Tahun 2011 belum dilakukan secara keseluruhan pada seluruh lokasi penanaman mengingat sub kegiatan monitoring masuk dalam anggaran perubahan APBD Tahun 2016 sehingga waktu yang tersedia hanya sekitar 2 bulan.
2. Tenaga pengamanan hutan, terutama PPNS, sangat terbatas dan saat ini menjabat sebagai pejabat struktural sehingga tidak bisa menangani kasus secara *intens*.
3. Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang kebakaran hutan dan lahan.
4. Hotspot banyak terdapat di luar kawasan hutan akan tetapi upaya instansi terkait di daerah dalam pengendalian kebakaran lahan masih kurang.
5. MPA dan kelompok tani belum dilengkapi dengan sarpras pemadaman kebakaran.



Solusi:

1. Pada Tahun 2017 telah dianggarkan sub kegiatan monitoring dan evaluasi penanaman tahun 2012 secara tepat sehingga dapat dilakukan pada awal tahun dan lokasi yang akan dimonitoring tingkat keterwakilannya terhadap objek evaluasi diharapkan akan menjadi lebih tinggi.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Menambah jumlah PPNS.
4. Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti: apel siaga, kampanye, dan lain-lain.
5. Melengkapi MPA dan kelompok tani pengamanan swadaya dengan sarpras pemadam kebakaran.

III. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Tujuan **Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan** dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Meningkatnya Produksi Dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Non Kayu** dan diukur dengan dua indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 35 berikut ini.

Tabel 35. Tujuan dan Sasaran Strategis III

TUJUAN 3	SASARAN 3
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

“Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan” merupakan tujuan untuk mengambil manfaat dari hutan namun tetap menjaga kelestariannya. Tujuan ini dapat dicapai salah satunya adalah melalui meningkatkan produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dengan pengelolaan hutan yang tepat yang dijadikan sasaran strategis untuk mengukur ketercapaian Tujuan 3 di atas. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu” Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 36 berikut ini.



Tabel 36. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2016

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	80%	375,66%	469,58
		Optimalisasi PNBK sektor kehutanan	80%	98,10%	122,63
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					296,10

Dari Tabel 36 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis III pada Tahun 2016 berhasil dicapai dengan baik. Rata-rata capaian sasaran 296,10% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 296,10% di atas adalah produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada Tahun 2016 dapat dioptimalkan 296,10% dari target yang ditetapkan.

Tabel 37. Perbandingan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2015 dan Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2016	Realisasi	
			2015 (n-1)	2016 (n)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	80%	61,6%	375,66%
	Optimalisasi PNBK sektor kehutanan	80%	112%	98,10%

Dari Tabel 37 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator diatas untuk indikator kinerja "Persentase Pencapaian Target Produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)" meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 509.84% hal ini disebabkan pada Tahun 2015 indikator pencapaian target produksi hasil hutan hanya bersumber dari hasil hutan kayu sedangkan hasil hutan bukan kayu tidak diikutsertakan dalam penghitungan target produksi. Ternyata dari hasil penghitungan pencapaian target produksi hasil hutan pada Tahun 2016, hasil hutan bukan kayu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencapaian target indikator kinerja tersebut di atas. Indikator kinerja "Optimalisasi PNBK Sektor Kehutanan" mengalami penurunan sebesar 18,82% hal ini disebabkan pada Tahun 2016 pencapaian target produksi hasil hutan kayu mengalami penurunan dari 61,58% di Tahun 2015 menjadi 42,76% pada Tahun 2016, penurunan hasil hutan kayu menyebabkan turunnya optimalisasi PNBK sektor kehutanan secara



signifikan, seperti yang kita ketahui hasil penghitungan PNBP sebagian besar berasal dari PSDH-DR hasil hutan kayu.

Tabel 38. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	85%	375,66%	441,95
	Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	85%	98,10%	115,41

Tabel 38 memperlihatkan bahwa capaian kedua indikator kinerja Sasaran III di atas pada Tahun 2016 telah mendukung capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra bahkan melebihi target akhir Renstra yang ditetapkan. Capaian dua indikator kinerja di atas akan terus dipertahankan sehingga sasaran Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat dicapai pada target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

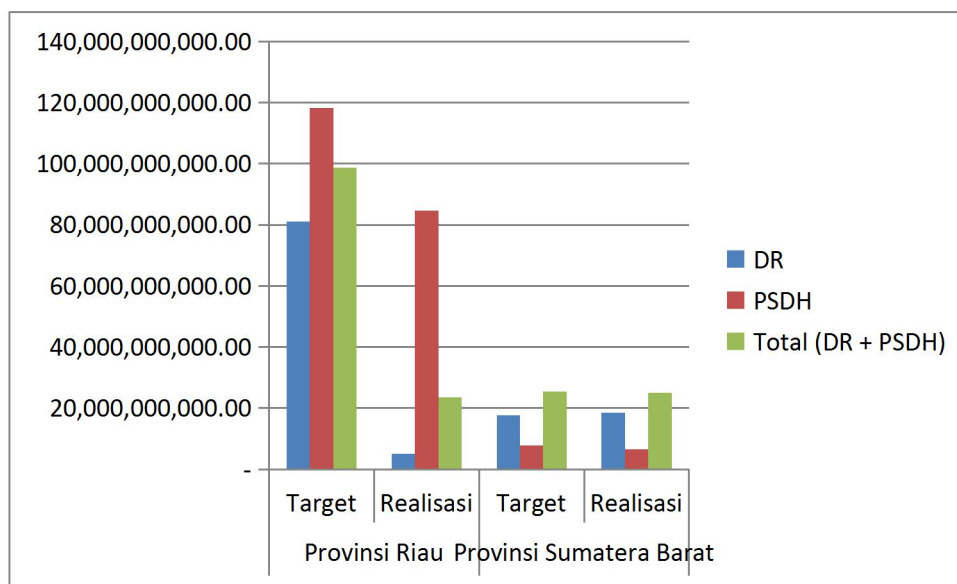
Tabel 39. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2016		Ket
		Sumbar	Riau	
1	2	3		
Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	374,83%	-	-
	Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	98,10%	44,98%	Lebih Tinggi

Dari Tabel 39 dapat dilihat capaian indikator Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Riau karena hingga saat penyusunan Laporan Kinerja ini Dinas Kehutanan Provinsi Riau masih belum memberikan datanya. Sementara untuk indikator Optimalisasi PNBP sektor kehutanan capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dari Provinsi Riau. Hasil koordinasi via telpon dengan Staf Dinas Kehutanan Provinsi Riau



angka realisasi PNBPN tersebut adalah realisasi dari Bulan Januari 2016 s.d November 2016 dan tidak memasukan nilai cadangan. Sementara untuk Provinsi Sumatera Barat realisasi tersebut termasuk realisasi dari Bulan November 2015 s/d November 2016. Perbandingan angka realisasi indikator Optimalisasi PNBPN sektor kehutanan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 9 di bawah ini.



Gambar 9. Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBPN (DR dan PSDH) di Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat

Dari Gambar 9 di atas dapat dilihat target penerimaan PNBPN Provinsi Riau sebesar Rp 199.371.775.478,- terealisasi sebesar Rp 89.680.032.993,31 atau sebesar 44,98% sementara di Provinsi Sumatera Barat target penerimaan PNBPN adalah sebesar Rp 25.405.509.752 terealisasi sebesar Rp 24.923.352.340,15 atau sebesar 98,10%.

Pencapaian kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran ini di dukung oleh beberapa kegiatan diantaranya yaitu pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu, kegiatan optimalisasi PNBPN, kegiatan pengembangan industri, hutan alam dan hutan tanaman, kegiatan pembinaan dan pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu, kegiatan optimalisasi PNBPN merupakan kegiatan untuk mengetahui produksi hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yang dikeluarkan atau diproduksi dari hutan melalui pengendalian dan monitoring laporan produksi hasil hutan setiap bulan, monitoring dan evaluasi PSDH (Pendapatan Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Rebiosasi) setiap triwulan, dan stock opname hasil hutan kayu pada perusahaan yang memiliki ijin perusahaan hutan.



Kegiatan pembinaan dan pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan merupakan kegiatan untuk mengetahui keabsahan apakah hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu telah dikeluarkan dari hutan dengan menggunakan dokumen legal.

Kegiatan pengembangan industri, hutan alam dan hutan tanaman adalah kegiatan untuk mengetahui apakah semua industri kehutanan yang ada di Sumatera Barat telah melaksanakan usahanya sesuai aturan yang berlaku dan apakah setiap industri telah menggunakan bahan baku dari sumber yang legal.

Seluruh Kegiatan pembinaan dan pengendalian tersebut di atas dilakukan untuk dapat meningkatkan dan memonitor produksi kehutanan agar tidak ada hasil hutan illegal yang akan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan Negara sektor kehutanan dapat menghitung persentase pencapaian target produksi dan penerimaan Negara sektor kehutanan yang merupakan indikator kinerja untuk mengukur capaian Sasaran Strategis III. Jika setiap perusahaan hutan, baik itu hutan alam maupun hutan tanaman memenuhi setiap aturan pengelolaan hutan secara taat maka sasaran strategis meningkatnya kinerja, produksi hasil hutan dan pendapatan sektor kehutanan dapat dicapai.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui dua program yang terdiri atas satu program dengan pembiayaan APBD dan satu Program dengan pembiayaan APBN, Program dimaksud adalah:

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan tujuh kegiatan yaitu:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
 - b. Optimalisasi PNBK
 - c. Pengembangan industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman
 - d. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan
 - f. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
 - g. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK yang terdiri dari satu kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi dengan sub komponen yaitu:
 - a. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 40 berikut ini.



Tabel 40. Realisasi Pencapaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis III Tahun 2016

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
3.	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu Indikator Sasaran: 1. Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) 2. Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksih Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Laporan	1 Laporan	100%	
			Optimalisasi PNBP	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK Hutan Alam	3 Laporan	3 Laporan	100%	
			Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan Olahan, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman	3 Laporan	3 Laporan	100%	
			Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan	1 Laporan	1 Laporan	100%	
			Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)	Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan	10 Kel	10 Ke	100%	
			Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah KPHL Bukit Barisan	Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPHL Bukit Barisan	2 lokasi	2 lokasi	100%	
			Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bkit Barisan	Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan	3 Laporan	3 Laporan	100%	
				Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	8 Laporan	8 Laporan	100%
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK							



Uraian capaian IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah sebagai berikut :

1. Indikator Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)" memiliki target sebesar 80%, terealisasi sebesar 375,66% dengan tingkat capaian 469,58% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini di dukung oleh Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK seperti terlihat pada Tabel 40 di atas.

Indikator Kinerja Utama "Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)" diukur dengan rumus rata-rata dari persentase realisasi produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu tahun n dibandingkan dengan target produksi hasil hutan kayu dan asil hutan bukan kayu tahun n.

Capaian Target IKU persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) Tahun 2016 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 41 berikut ini.

Tabel 41. Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis per Triwulan Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu	a. persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	20%	40%	60%	80%	19.93%	99.65	44.17%	110.43	62.65%	104.42	375.66%	469.58

Dari Tabel 41 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan kecuali pada triwulan I seharusnya indikator kinerja ini sudah tercapai 20% pada triwulan I namun karena adanya kebijakan tentang tata usaha hasil hutan menyebabkan realisasi produksi berkurang dan belum mencapai target.

Untuk mencapai target target indikator kinerja "persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)" Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa upaya diantaranya adalah melakukan monitoring produksi dan pengendalian perusahaan hutan pada pemegang Ijin Usaha



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Hutan Tanaman (HT)/ Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Provinsi Sumatera Barat. Melakukan monitoring produksi hasil hutan bukan kayu pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.

Melihat perkembangan pencapaian target produksi kehutanan, mengalami penurunan dari Tahun 2015 yaitu 61,58% menjadi 42,76% pada Tahun 2016. Menurunnya capaian persentase target produksi kehutanan disebabkan karena pada Tahun 2016 pemegang ijin IUPHHK-HA/HT dan IPK banyak yang tidak merealisasikan target produksi sesuai ijin produksi yang disahkan.

Target produksi produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan penerimaan PSDH dan DR Tahun 2016 di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 42 berikut ini.

Tabel 42. Target Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Penerimaan PSDH dan DR Tahun 2016 di Sumatera Barat

No.	Nama Wajib Bayar/ Kode Referensi	Jenis Hasil Hutan	TARGET PRODUKSI HHK DAN HHBK DAN PENERIMAAN PNBP TAHUN 2016								
			Satuan	Volume	PSDH		DANA REBOISASI				
					Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Tarif (USD)	Jumlah (USD)	Nilai Tukar	Jumlah (Rp)	
01	KABUPATEN AGAM										
1	Hasil Hutan Kayu Kayu Rakyat	Kel. Meranti (KB) Kel. Meranti (KBS) Kel. Campuran (KB) Kel. Campuran (KBS) KBK Acasia	M3 M3 M3 M3 M3 M3	- - - - - -	64,000 62,000 34,000 32,000 31,000 5,400	- - - - - -	14.50 14.00 12.50 12.00	- - - - - -	12,600 12,600 12,600 12,600	- - - - - -	
	JUMLAH 1			-	-	-	-	-	-	-	
2	Hasil Hutan Non Kayu	Getah Pinus Manau Tabu-tabu Rotan Sega Semambu	Ton Btg Btg Ton Btg	325.25 - - - -	42,000 - - - -	13,660,500 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	JUMLAH 2					13,660,500					
	JUMLAH (01)					13,660,500		-		-	
02	KABUPATEN PASAMAN										
1	Hasil Hutan Kayu Kayu Rakyat	Kel. Meranti Kel. Meranti (KBS) Kel. Campuran (KB) Kel. Campuran (KBS) KBK Acasia	M3 M3 M3 M3 M3 M3	- - - - - -	64,000 62,000 34,000 32,000 31,000 5,400	- - - - - -	14.50 14.00 12.50 12.00	- - - - - -	12,600 12,600 12,600	- - - - - -	
	JUMLAH 1			-	-	-	-	-	-	-	
	Hasil Hutan Non Kayu	Getah Pinus Manau Tabu-tabu Rotan lainnya Datuk Semambu	Ton Btg Btg Ton Btg	150 6,600 6,500 15 325	42,000 180 120 108,000 60	6,300,000 1,188,000 780,000 1,620,000 19,500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	JUMLAH 2					9,907,500					
	JUMLAH (02)					9,907,500		-		-	
03	KABUPATEN 50 KOTA										
1	Hasil Hutan Kayu Kayu Rakyat	Kel. Meranti Kel. Meranti (KBS) Kel. Campuran (KB) Kel. Campuran (KBS) KBK Acasia	M3 M3 M3 M3 M3 M3	- - - - - -	64,000 62,000 34,000 32,000 31,000 5,400	- - - - - -	14.50 14.00 12.50 12.00	- - - - - -	12,600 12,600 12,600	- - - - - -	
	JUMLAH 1			-	-	-	-	-	-	-	



No.	Nama Wajib Bayar/ Kode Referensi	Jenis Hasil Hutan	TARGET PRODUKSI HHK DAN HHBK DAN PENERIMAAN PNBP TAHUN 2016							
			Satuan	Volume	PSDH		DANA REBOISASI			
					Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Tarif (USD)	Jumlah (USD)	Nilai Tukar	Jumlah (Rp)
2	Hasil Hutan Non Kayu	Getah Pinus Manau Tabu-tabu Rotan lainnya Datuk Semambu	Ton Btg Btg Ton Btg	834.55 - - - -	42,000 - - - -	35,051,100 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	JUMLAH (03)					35,051,100				
04	KABUPATEN SOLOK									
1	Hasil Hutan Kayu Kayu Rakyat	Kel. Meranti (KB) Kel. Meranti (KBS) Kel. Campuran (KB) Kel. Campuran (KBS) KBK Acasia	M3 M3 M3 M3 M3 M3	- - 100.00 - - -	64,000 62,000 34,000 32,000 31,000 5,400	- - 3,400,000 - - -	14.50 14.00 12.50 12.00 - -	- - 1,250.00 - - -	12,600 12,600 12,600 12,600 - -	- - 15,750,000 - - -
	JUMLAH 1			100.00		3,400,000		1,250.00		15,750,000
2	Hasil Hutan Non Kayu	Getah Pinus Manau Tabu-tabu Rotan lainnya Datuk Semambu	Ton Btg Btg Ton Btg	500 8,000 - - -	42,000 180 - - -	21,000,000 1,440,000 - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	JUMLAH 2					22,440,000				
	JUMLAH (04)					25,840,000		1,250.00		15,750,000
05	Kab. PADANG PARIAMAN									
1	Hasil Hutan Kayu Kayu Rakyat	Kel. Meranti (KB) Kel. Meranti (KBS) Kel. Campuran (KB) Kel. Campuran (KBS) KBK Acasia	M3 M3 M3 M3 M3 M3	- - - - - -	64,000 62,000 34,000 32,000 31,000 5,400	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
	JUMLAH 1									
2	Hasil Hutan Non Kayu	Getah Pinus Manau Tabu-tabu Rotan lainnya Datuk Semambu	Ton Btg Btg Ton Btg	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	JUMLAH 2									
	JUMLAH (05)									
06	KAB. PESISIR SELATAN									
1	Hasil Hutan Kayu Kayu Rakyat	Kel. Meranti (KB) Kel. Meranti (KBS) Kel. Campuran (KB) Kel. Campuran (KBS) KBK Acasia	M3 M3 M3 M3 M3 M3	- - - - - -	64,000 62,000 34,000 32,000 31,000 5,400	- - - - - -	14.50 14.00 12.50 12.00 4.00 -	- - - - - -	12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 -	- - - - - -
	JUMLAH 1									
2	Hasil Hutan Non Kayu	Getah Pinus Manau Tabu-tabu Rotan lambang Semambu	Ton Btg Btg Ton Btg	250 100,000 5,000 50 -	42,000 180 120 54,600 -	10,500,000 18,000,000 600,000 2,730,000 -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	JUMLAH 2					31,830,000				
	JUMLAH (06)					31,830,000				
07	KAB. TANAH DATAR									
1	Hasil Hutan Kayu Kayu Rakyat	Kel. Meranti (KB) Kel. Meranti (KBS) Kel. Campuran (KB) Kel. Campuran (KBS) KBK Acasia	M3 M3 M3 M3 M3 M3	- - - - - -	64,000 62,000 34,000 32,000 31,000 5,400	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
	JUMLAH 1									
2	Hasil Hutan Non Kayu	Getah Pinus Manau Tabu-tabu Rotan lambang Semambu	Ton Btg Btg Ton Btg	700 - - - -	42,000 - - - -	29,400,000 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	JUMLAH 2					29,400,000				
	JUMLAH (07)					29,400,000				
08	KABUPATEN SUJUNG									
1	Hasil Hutan Kayu IUPHHK -HA	Kel. Meranti (KB) Kel. Meranti (KBS) Kel. Campuran (KB) Kel. Campuran (KBS) KBK Acasia	M3 M3 M3 M3 M3 M3	- - - - - -	64,000 62,000 34,000 32,000 31,000 5,400	- - - - - -	14.50 14.00 12.50 12.00 4.00 -	- - - - - -	12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 -	- - - - - -
	JUMLAH 1									



No.	Nama Wajib Bayar/ Kode Referensi	Jenis Hasil Hutan	TARGET PRODUKSI HHK DAN HHBK DAN PENERIMAAN PNPB TAHUN 2016							
			Satuan	Volume	PSDH		DANA REBOISASI			
					Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Tarif (USD)	Jumlah (USD)	Nilai Tukar	Jumlah (Rp)
2	Hasil Hutan Non Kayu	Getah Pinus	Ton	-	-	-	-	-	-	-
		Manau	Btg	-	-	-	-	-	-	-
		Tabu-tabu	Btg	-	-	-	-	-	-	-
		Rotan lambang	Ton	-	-	-	-	-	-	-
		Semambu	Btg	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH 2									
	JUMLAH (07)									
09	KAB.KEP. MENTAWAI									
1	Hasil Hutan Kayu IUPHHK-HA	Kel. Meranti (KB)	M3	61,374	64,000	3,927,936,000	14.50	889,923	12,600	11,213,029,800
		Kel. Meranti (KBS)	M3	30,000	62,000	1,860,000,000	14.00	420,000	12,600	5,292,000,000
		Kel. Campuran (KB)	M3	4,600	34,000	156,400,000	12.50	57,500	12,600	724,500,000
		Kel. Campuran (KBS)	M3	1,500	32,000	48,000,000	12.00	18,000	12,600	226,800,000
		KBK	M3	43.54	31,000	1,349,740	4.00	174	12,600	2,194,416
		Acasia			5,400					
	JUMLAH 1			97,518		5,993,685,740		1,385,597		17,458,524,216
2	Hasil Hutan Non Kayu	Getah Pinus	Ton	-	-	-	-	-	-	-
		Manau	Btg	400,000	180	72,000,000	-	-	-	-
		Tabu-tabu	Btg	117,871	120	14,144,520	-	-	-	-
		Rotan Segi	Ton	35	38,100	1,333,500	-	-	-	-
		Semambu	Btg	-	60	-	-	-	-	-
	JUMLAH 2					87,478,020				
	JUMLAH (09)					6,081,163,760		1,385,597		17,458,524,216
10	KOTA BUKITTINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KOTA PADANG PANJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KOTA SAWAHLUNTO									
1	Hasil Hutan Kayu IUPHHK -HA	Kel. Meranti (KB)	M3	-	64,000	-	14.50	-	12,600	-
		Kel. Meranti (KBS)	M3	-	62,000	-	14.00	-	12,600	-
		Kel. Campuran (KB)	M3	-	34,000	-	12.50	-	12,600	-
		Kel. Campuran (KBS)	M3	-	32,000	-	12.00	-	12,600	-
		KBK	M3	-	31,000	-	4.00	-	12,600	-
		Acasia	M3	-	5,400	-	-	-	12,600	-
	JUMLAH 1									
2	Hasil Hutan Non kayu	Getah Pinus	Ton	371	42,000	15,582,000	-	-	-	-
		Manau	Btg	-	180	-	-	-	-	-
		Tabu-tabu	Btg	-	120	-	-	-	-	-
		Rotan Segi	Ton	-	38,100	-	-	-	-	-
		Semambu	Btg	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH 2					15,582,000				
	JUMLAH (12)					15,582,000				
13	KOTA SOLOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KOTA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KOTA PAYAKUMBUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KOTA PARIAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KAB. DHARMASRAYA									
	Hasil Hutan Kayu Kayu Rakyat	Kel. Meranti (KB)	M3	-	64,000	-	14.50	-	12,600	-
		Kel. Meranti (KBS)	M3	25.36	62,000	1,572,320	14.00	355.04	12,600	4,473,504
		Kel. Campuran (KB)	M3	180.76	34,000	6,145,840	12.50	2,259.50	12,600	28,469,700
		Kel. Campuran (KBS)	M3	350.97	32,000	11,231,040	12.00	4,211.64	12,600	53,066,664
		KBK Meranti	M3	545.72	31,000	16,917,320	4.00	2,182.88	12,600	27,504,288
		Acasia	M3	-	5,400	-	-	-	-	-
	JUMLAH 1			1,102.81		35,866,520		9,009.06		113,514,156
2	Hasil Hutan Non kayu	Getah Pinus	Ton	-	42,000	-	-	-	-	-
		Manau	Btg	-	180	-	-	-	-	-
		Tabu-tabu	Btg	-	120	-	-	-	-	-
		Rotan Segi	Ton	-	38,100	-	-	-	-	-
		Semambu	Btg	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH 2									
	JUMLAH (17)					35,866,520		9,009		113,514,156
18	SOLOK SELATAN									
1	Hasil Hutan Kayu HGU PT MSP	Kel. Meranti (KB)	M3	-	64,000	-	14.50	-	12,600	-
		Kel. Meranti (KBS)	M3	-	62,000	-	14.00	-	12,600	-
		Kel. Campuran (KB)	M3	-	34,000	-	12.50	-	12,600	-
		Kel. Campuran (KBS)	M3	-	32,000	-	12.00	-	12,600	-
		KBK	M3	-	31,000	-	4.00	-	12,600	-
		Acasia	M3	275,000	5,400	1,485,000,000	-	-	-	-
	JUMLAH 1			275,000.00		1,485,000,000				



No.	Nama Wajib Bayar/ Kode Referensi	Jenis Hasil Hutan	TARGET PRODUKSI HHK DAN HHBK DAN PENERIMAAN PNPB TAHUN 2016								
			Satuan	Volume	PSDH		DANA REBOISASI				
					Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Tarif (USD)	Jumlah (USD)	Nilai Tukar	Jumlah (Rp)	
2	Hasil Hutan Non kayu	Getah Pinus	Ton	-	42,000	-	-	-	-	-	-
		Manau	Btg	-	180	-	-	-	-	-	-
		Tabu-tabu	Btg	-	120	-	-	-	-	-	-
		Rotan Sega	Ton	-	38,100	-	-	-	-	-	-
		Semambu	Btg	-	60	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH 2					-	-	-	-	-	-
	JUMLAH (18)					1,485,000,000					
19	PASAMAN BARAT										
	Hasil Hutan Kayu	Kel. Meranti (KB)	M3	-	64,000	-	14.50	-	12,600	-	-
	IUPHHK-	Kel. Meranti (KBS)	M3	100	62,000	6,200,000	14.50	1,450	12,600	18,270,000	-
		Kel. Campuran (KB)	M3	100	34,000	3,400,000	12.50	1,250.00	12,600	15,750,000	-
	Kayu Rakyat (KB)	Kel. Campuran (KBS)	M3	-	32,000	-	12.50	-	12,600	-	-
		KBK	M3	-	31,000	-	-	-	-	-	-
		Acasia	M3	-	5,400	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH 1			200.00		9,600,000		2,700.00		34,020,000	
1	Hasil Hutan Non kayu	Getah Pinus	Ton	-	42,000	-	-	-	-	-	-
		Manau	Btg	40,000	180	7,200,000	-	-	-	-	-
		Tabu-tabu	Btg	30,000	120	3,600,000	-	-	-	-	-
		Rotan Sega	Ton	-	38,100	-	-	-	-	-	-
		Semambu	Btg	-	60	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH 2					10,800,000					
	JUMLAH (19)					20,400,000		2,700		34,020,000	
	TOTAL HASIL HUTAN KAYU	Kel. Meranti (KB)	M3	61,374.00	64,000	3,927,936,000.00		889,923.00		11,213,029,800.00	
		Kel. Meranti (KBS)	M3	30,125.36	62,000	1,867,772,320.00		421,805.04		5,314,743,504.00	
		Kel. Campuran (KB)	M3	4,980.76	34,000	169,345,840.00		62,259.50		784,469,700.00	
		Kel. Campuran (KBS)	M3	1,850.97	32,000	59,231,040.00		22,211.64		279,866,664.00	
		KBK	M3	589.26	31,000	18,267,060.00		2,357.04		29,698,704.00	
		Acasia	M3	275,000.00	5,400	1,485,000,000.00		-		-	
	TOTAL PENERIMAAN PSDH DAN DR DARI PRODUKSI HHK			373,920.35		7,527,552,260.00		1,398,556.22		17,621,808,372.00	
	TOTAL HASIL HUTAN NON KAYU	Getah Pinus	Ton	3,130.80	-	131,493,600.00		-		-	
		Manau	Btg	554,600.00	-	99,828,000.00		-		-	
		Tabu-tabu	Btg	159,371.00	-	19,124,520.00		-		-	
		Rotan Segga,dll	Ton	100.00	-	5,683,500.00		-		-	
		Semambu	Btg	325.00	-	19,500.00		-		-	
	TOTAL PENERIMAAN PSDH DAN DR DARI PRODUKSI HHBK					256,149,120		-		-	
						7,783,701,380		1,398,556.22		17,621,808,372.00	
	TOTAL PENERIMAAN PSDH DAN DR DARI PRODUKSI HHK DAN HHBK									25,405,509,752.00	

Untuk mengetahui persentase pencapaian Target Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) maka harus di peroleh angka realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada tahun yang sama. Pada Tahun 2016 realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 42 di bawah.

Jika dilihat dari Tabel 43 dan Tabel 44 dapat diketahui persentase pencapaian target Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Sumatera Barat pada Tahun 2016 adalah 375,66%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Tingginya persentase capaian produksi HHK dan HHBK disebabkan karena tingginya realisasi dari produksi Semambu (HHBK) yaitu sebanyak 6.795 batang sementara target hanya 325 batang sehingga persentase capaian produksi menjadi 2.090,77%. Sementara untuk capaian produksi Hasil Hutan Kayu hanya sebesar 42,76%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2015 pencapaian target produksi kehutanan hanya dihitung dari produksi HHK dan produksi hasil hutan bukan kayu belum dihitung.

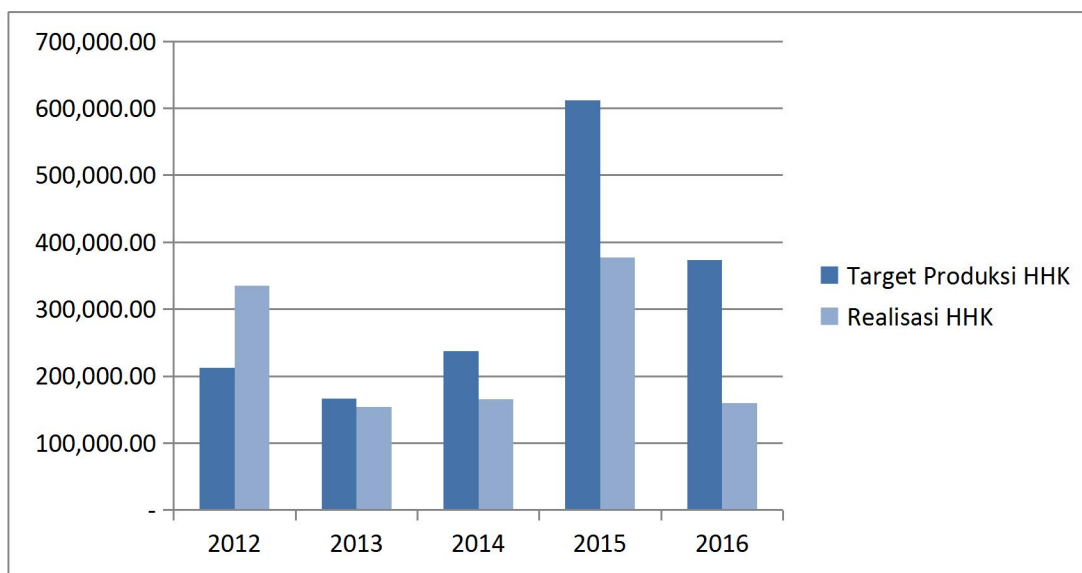


Tabel 43. Rekapitulasi Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Sumatera Barat di Sumatera Barat

NO	KABUPATEN / KOTA	HASIL HUTAN KAYU					HASIL HUTAN NON KAYU					KET.	
		Indah (M3)	Meranti (M3)	Campuran (M3)	KEK (M3)	Acasia (M3)	Manau (Btg)	Tabu2 (Btg)	Rotan (Kg)	Semambu (Btg)	G. Pinus (Kg)		
1	Kabupaten Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Getah Pinus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,666
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,666
2	Kabupaten Pasaman	-	7.68	6.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Getah Pinus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,967.00
	IPH-HBK Manau	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Semambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,795.00	-	-
	IPH-HBK Rotan	-	-	-	-	-	-	-	5,660.00	-	-	-	-
	JUMLAH	-	7.68	6.05	-	-	5,500.00	5,611.00	5,660.00	6,795.00	-	39,967.00	
3	Kabupaten Limapuluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Getah Pinus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,119,212.00
	IPH-HBK Manau	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	108,647.00
	IPH-HBK Tabu-tabu	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	2,100.00	4,800.00	-	-	-	-	1,227,859.00
4	Kabupaten Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Pinus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640,217.00
	IPH-HBK MANAU	-	-	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	-	640,217.00
5	Kabupaten Pesisir Selatan	-	1.88	4.66	179.87	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Getah Pinus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,204.00
	IPH-HBK Manau	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Tabu-tabu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Rotan Lambang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MELUDI	-	0.28	0.56	48.94	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARGANI	-	2.74	2.40	44.73	-	-	-	-	-	-	-	-
ALJUPRIADI	-	3.66	0.90	45.36	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	-	8.56	8.52	318.90	-	5,000.00	-	-	-	-	-	89,204.00
6	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Pinus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430,825.00
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430,825.00
7	Kabupaten Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IUPHHK-HA PT MLP	-	-	-	71.90	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPK KARYA BATANI	-	1,165.32	1,751.02	47.58	-	-	-	-	-	-	-	-
	KAA	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	1,178.32	1,751.02	119.48	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IUPHHK-HT PT.MPL	-	43,303.97	239.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IUPHHK-HT PT.SSS	-	41,826.77	956.82	186.41	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Manau	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Tabu-tabu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	85,130.74	1,196.64	186.41	-	75,000.00	-	-	250.00	-	-	-
9	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPPKH Dinas PU Swl	0.14	3.68	107.73	3.27	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Getah Pinus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,500.00
	JUMLAH	0.14	3.68	107.73	3.27	-	-	-	-	-	-	-	327,500.00
10	Kabupaten Dharmasraya	-	625.38	167.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koperasi Padu Plihan	-	158.14	820.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	783.52	988.07	-	-	4,090.28	-	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PT.MULTI SAWIT PRIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PT.MULTI SAWIT PRIMA	-	350.12	4,720.58	1,849.88	-	-	-	-	-	-	-	-
	IUPHHK-HT PT BRM Acasia	-	-	-	-	-	56,894.70	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	350.12	4,720.58	1,849.88	56,894.70	-	-	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Pasaman Barat	-	1.67	165.51	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kel. Tani Baudu Sepakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPH-HBK Manau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	1.67	165.51	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.14	87,464.29	8,944.12	2,478.99	60,984.98	89,150.00	10,411.00	5,660.00	6,795.00	2,886,238.00	-	-
	PROD KB NOV 2015+ IDENTIFIKASI SPD 15 NOVEMBER 2016					159,872.52							
	PERSENTASE CAPAIAN PRODUKSI PER JENIS HHK DAN					42.76	16.07	6.53	5.66	2,090.77	87.18		
	PERSENTASE CAPAIAN PRODUKSI HHK DAN HHBK												374.83



Untuk melihat perkembangan Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) pada lima tahun dapat dilihat pada Gambar 10 berikut ini.



Gambar 10. Perkembangan Produksi Hasil Huta Kayu (HHK) Lima Tahun Terakhir

Dari Gambar 10 di atas dapat diketahui Target Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) pada Tahun 2016 menurun dari Tahun 2015 sebesar 38,93%. Sedangkan dari realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) juga terjadi penurunan sebesar 57,60%. Dilihat dari persentase pencapaian target untuk Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) juga terjadi penurunan sebesar 18,82 % yaitu dari 61,58% pada Tahun 2015 menjadi 42,76% pada Tahun 2016.

Tahun 2016, dalam rangka pencapaian target IKU persentase pencapaian target Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 925.000.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 630.075.500,- Pada Tahun 2016 ada arahan dari DPKD untuk melakukan penghematan (penundaan kegiatan karena adanya pengurangan DAU tanpa merubah target sasaran) maka alokasi dana untuk mencapai IKU ini telah dikurangi sebesar Rp 123.341.000,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai IKU ini adalah sebesar Rp 630.075.500,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 592.474.900,- atau 78,64% terhadap alokasi dana perubahan dan 94,03% terhadap dana pemotongan DAU. Maka Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 160.941.600,- atau 21,36% dari alokasi dana perubahan dan sebesar Rp 37.600.000,- atau 5,97% dari alokasi dana pemotongan DAU. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 374,83 dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.



2. Indikator Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan

Indikator Kinerja Utama "Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan" memiliki target sebesar 81%, terelisir sebesar 98,10% dengan tingkat capaian 122,63% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator Kinerja Utama "Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan" diukur dengan menghitung persentase realisasi penerimaan negara sektor kehutanan tahun berjalan dibandingkan dengan target penerimaan negara sektor kehutanan tahun berjalan.

Capaian Target IKU Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan Tahun 2016 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 44 berikut ini.

Tabel 44. Capaian Target IKU Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan Tahun 2016 Setiap Triwulannya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu	b. Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan	20%	40%	60%	80%	20.26%	101.3	39.80%	99.5	57.34%	95.57	98.10%	122.63

Dari Tabel 44 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai diatas 90% dari target triwulan yang ditetapkan. Untuk pencapaian IKU ini, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa upaya diantaranya adalah melakukan pemantauan/bimbingan teknis pungutan dan pemutakhiran data iuran kehutanan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) ke Kabupaten/Kota penghasil di Provinsi Sumatera Barat dan kemudian data tersebut akan dipergunakan sebagai bahan rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melihat perkembangan pencapaian target PNBP Sektor Kehutanan, mengalami penurunan dari Tahun 2015 yaitu 112,13% pada Tahun 2015 menjadi 98,10% pada Tahun 2016. Menurunkan capaian persentase target PNBP Sektor Kehutanan Tahun 2016 disebabkan realisasi produksi Hasil hutan kayu hanya sebesar 42,72%. Hal ini akan berpengaruh terhadap realisasi PNBP karena 98,99% dari target PNBP di Sumatera Barat (Rp 25.405.509.752,-) berasal pungutan DR dan PSDH hasil hutan kayu. Sedangkan dari HHBK hanya ikut berkontribusi sebesar 1,01%. Realisasi PNBP Sektor Kehutanan (PSDH dan DR) pada Tahun 2016 dapat di lihat pada Tabel 45 di bawah ini.



Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

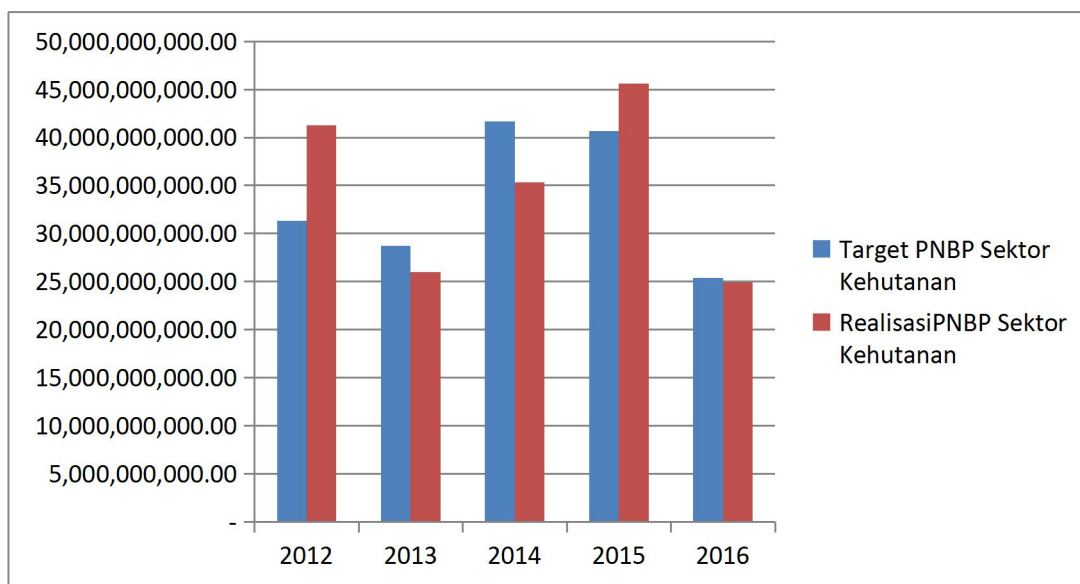
Tabel 45. Target dan Realisasi Penerimaan PSDH dan DR Tahun 2016



NO	KABUPATEN / KOTA	TARGET PENERIMAAN TAHUN 2016			REALISASI PSDH , DR NOV 2015 + IDENT/S/D NOV 2016			KET.
		PSDH	DR	DR	PSDH	DR	DR	
		(Rp)	US \$	(Rp)	(Rp)	US \$	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kabupaten Agam							
	IPH-HEK Getah Pinus	13,660,500	-	-	5,489,288	-	-	
	JUMLAH	13,660,500	-	-	5,489,288	-	-	
2	Kabupaten Pasaman	-	-	-	550,000.00	-	-	
	IPH-HEK Getah Pinus	6,300,000	-	-	5,332,614.00	-	-	
	IPH-HEK Manau	1,188,000	-	-	990,000.00	-	-	
	IPH-HEK Semambu	19,500	-	-	545,700.00	-	-	
	IPH-HEK Rotan	1,620,000	-	-	436,530.00	-	-	
	IPH-HEK Tabu-tabu	780,000	-	-	949,320.00	-	-	
	JUMLAH	9,907,500	-	-	8,804,164	-	-	
3	Kabupaten Limapuluh Kota							
	IPH-HEK Getah Pinus	35,051,100	-	-	47,015,300	-	-	identifikasi 30-Nov-16
					4,563,156	-	-	
	IPH-HEK Manau	-	-	-	378,000	-	-	
IPH-HEK Tabu-tabu	-	-	-	576,000	-	-		
	JUMLAH	35,051,100	-	-	52,532,456	-	-	
4	Kabupaten Solok	3,400,000	1,250.00	15,750,000	-	-	-	
	IPH-HEK Pinus	21,000,000	-	-	26,885,082	-	-	
	IPH-HEK MANAU	1,440,000	-	-	279,000	-	-	
	JUMLAH	25,840,000	1,250	15,750,000	27,164,082	-	-	
5	Kabupaten Pesisir Selatan				5,841,650	801.72	11,071,980.04	
	IPH-HEK Getah Pinus	10,500,000	-	-	3,746,568	-	-	
	IPH-HEK Manau	18,000,000	-	-	900,000	-	-	
	IPH-HEK Tabu-tabu	600,000	-	-	-	-	-	
	IPH-HEK Rotan Lambang	2,730,000	-	-	-	-	-	
	MELODI	-	-	-	1,552,420	206.40	2,866,070.40	
	MARGANI	-	-	-	1,633,310	246.08	3,276,309.12	
	ALJUPRIADI	-	-	-	1,661,880	243.48	3,241,692.72	
JUMLAH	31,830,000	-	-	15,335,828	1,498	20,456,062		
6	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	
	IPH-HEK Pinus	29,400,000	-	-	14,000,179	-	-	
	JUMLAH	29,400,000	-	-	14,000,179	-	-	
7	Kabupaten Sijunjung							
	IUP-HK-HA/PT MLP	-	-	-	2,228,900	287.60	3,989,587.20	
	IPK KARYA BATANI	-	-	-	134,259,960	38,642.68	504,750,122.24	
	KAA	-	-	-	806,000	182.00	2,381,652.00	
	JUMLAH	-	-	-	137,294,860	38,112	511,121,361	
8	Kabupaten Kep. Mentawai	5,993,685,740	1,385,597	17,458,524,216				
	IUP-HK-HT PT.MPL	-	-	-	2,778,339,800	630,588.31	8,357,310,323.79	
	IUP-HK-HT PT.SSS	-	-	-	2,712,414,260	617,991.96	8,221,648,502.47	
	IPH-HEK Manau	72,000,000	-	-	13,500,000	-	-	
	IPH-HEK Tabu-tabu	14,144,520	-	-	-	-	-	
	IPH-HEK Rotan Sega	1,333,500	-	-	9,525	-	-	
JUMLAH	6,081,163,760	1,385,597	17,458,524,216	5,504,263,585	1,248,580	16,578,958,826		
9	Kota Sawahlunto							
	IPPKH-Dinas PU Swi	-	-	-	2,874,310	894.13	12,195,039.07	
	IPH-HEK Getah Pinus	15,582,000	-	-	13,755,000	-	-	
	JUMLAH	15,582,000	-	-	16,629,310	894.13	12,195,039	
10	Kabupaten Dhamasraya	35,866,520	9,009.06	113,514,156.00	25,531,740	8,255.59	112,601,782.81	
	Koperasi Padu Pilihan	-	-	-	37,507,220	12,420.86	166,771,042.95	
	IUP-HK-HT PT BRM	-	-	-	24,031,512	-	-	
	JUMLAH	35,866,520	9,009.06	113,514,156.00	87,070,472	20,676.45	279,372,825.76	
11	Kabupaten Solok Selatan							
	PT.MULTI SAWIT PRIMA	-	-	-	-	256.74	3,527,350.86	clenda
	PT.MULTI SAWIT PRIMA	-	-	-	253,978,306	78,130.97	1,026,718,442.40	
	IUP-HK-HT PT BRM Acasia	1,485,000,000	-	-	307,231,926	-	-	
	JUMLAH	1,485,000,000	-	-	561,210,232	78,387.71	1,030,245,793.26	
12	Kabupaten Pasaman Barat	9,600,000	2,700	34,020,000.00	5,952,290.00	2,134.52	29,303,283.08	
	Kel. Tani Baudo Sepakat	-	-	-	6,459,520.00	1,465.85	19,492,873.00	
	IPEH-HK Manau	7,200,000	-	-	-	-	-	
	IPEH-HK Tabu-tabu	3,600,000	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	20,400,000	2,700	34,020,000.00	12,411,810	3,600.37	48,796,156.08	
		7,783,701,380	1,398,556	17,621,808,372	6,442,206,276	1,392,749	18,481,146,064	
PROD KB NOV 2015 + IDENTIFIKASI S/D 15 NOVEMBER 2016				25,405,509,752.00			24,923,352,340.15	



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir PNPB dari sektor kehutanan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut ini.



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kehutanan provinsi Sumabar Tahun 2015

Gambar 11. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan Lima Tahun Terakhir

Dari Gambar 11 di atas dapat diketahui penerimaan PNPB Sektor Kehutanan pada Tahun 2016 menurun dari Tahun 2015 sebesar 37,57%. Sementara untuk pencapaian target Optimalisasi PNPB Sektor kehutanan juga mengalami penurunan sebesar 14,02 % dari 112,13% pada tahun 2015 menjadi 98,10% pada Tahun 2016.

Dalam rangka pencapaian target IKU persentase pencapaian target Optimalisasi PNPB Sektor Kehutanan telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 125.000.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 124.760.000,- Pada Tahun 2016 ada arahan dari DPKD untuk melakukan penghematan (penundaan kegiatan karena adanya pengurangan DAU tanpa merubah target sasaran) maka alokasi dana untuk mencapai IKU ini telah dikurangi sebesar Rp 740.000,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai IKU ini adalah sebesar Rp 124.020.000,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 118.839.250,- atau 95.25% terhadap alokasi dana perubahan dan 95.82% terhadap dana pemotongan DAU. Maka Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 5.920.750,- atau 4.75% dari alokasi dana perubahan dan sebesar Rp 5.180.750,- atau 4,18% dari alokasi dana pemotongan DAU. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 98,10 dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.



Tahun 2016, dalam rangka pencapaian target IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 1.050.000.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 878.176.500,- Pada Tahun 2016 ada arahan dari DPKD untuk melakukan penghematan (penundaan kegiatan karena adanya pengurangan DAU tanpa merubah target sasaran) maka alokasi dana untuk mencapai IKU ini telah dikurangi sebesar Rp 124.081.000,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai IKU ini adalah sebesar Rp 754.095.500,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 711.414.150,- atau 81.00% terhadap alokasi dana perubahan dan 94,33% terhadap dana pemotongan DAU. Maka Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 166.862.350,- atau 19% dari dana yang perubahan tersedia dan sebesar Rp 42.781.350,- atau 5,67% dari dana pemotongan DAU. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 295,58% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Permasalahan:

1. Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu di Sumatera Barat hanya terealisasi sebesar 42,76%. Hal ini disebabkan karena target produksi HHK pada PT Multi Karya Lisun Prima tidak dapat terealisasi hal ini disebabkan adanya konflik antara PT Multi Karya Lisun Prima dengan masyarakat sekitar lokasi.

Solusi:

1. Dinas Kehutanan menyarakann Pihak PT.Multi Karya Lisun Prima untuk melakukan pendekatan secara persuasif dengan masyarakat sekitar lokasi perusahaan sehingga pada Tahun 2017 perusahaan dapat kembali berproduksi sehingga target yang ditetapkan dapat direalisasikan.

IV. Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm

Tujuan **memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan** dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm** dan diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 46 berikut ini.

Tabel 46 Tujuan dan Sasaran Strategis IV.

TUJUAN 4	SASARAN 4
Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan	Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm



Tujuan “Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan” merupakan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap sumberdaya alam terutama kawasan hutan. Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat atau Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Nagari, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat memberikan pengakuan sosial yang luar biasa, pengakuan status hukum bagi masyarakat, memberikan kejelasan dalam pengelolaan kawasan hutan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat.

Tujuan ini dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam peningkatan akses pengelolaan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat untuk mengukur ketercapaian Tujuan 4 di atas. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm” Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 47 berikut ini.

Tabel 47. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengelolaan Hutan Melalui Pola HTR, HN dan HKm Tahun 2016

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan	5,32%	11,15%	209,59
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					209,59

Dari Tabel 47 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis IV pada Tahun 2016 berhasil dicapai dengan baik. Rata-rata capaian sasaran 209,59% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 209,59% di atas adalah luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui pola HTR, Hm dan HN pada Tahun 2016 telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 48. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengelolaan Hutan Melalui Pola HTR, HN dan HKm Tahun 2015 dan Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2016	Realisasi	
			2015 (n-1)	2016 (n)
Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan	5,32%	-	11,15%



Dari Tabel 48 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan” pada tahun 2015 belum diukur dan IKU ini merupakan IKU tahun pertama untuk Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahunn 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tabel 49. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengelolaan Hutan Melalui Pola HTR, HN dan HKm s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	21,21%	11,15%	52,57

Tabel 49 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan di atas pada Tahun 2016 telah mendukung capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 52,57%. Memperhatikan tingkat kwemajuan hasil capaian maka diperkirakan sasaran Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm pada target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan dapat dicapai.

Tabel 50. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat/Kemitraan Pada Provinsi Sumatera Barat Dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2016		Ket
		Sumbar	Riau	
Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	209,59	-	-

Dari Tabel 50 dapat dilihat, capaian indikator tersebut di atas tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi Riau karena Provinsi tidak mempunyai sasaran dan indikator yang sama dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat



Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui dua program yang terdiri atas satu program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN, program dimaksud adalah:

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan (APBD) yang terdiri dari lima kegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan
 - c. Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan
 - d. Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat
 - e. Penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK Kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dengan lima sub komponen yaitu:
 - a. Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial
 - b. Bimbingan Teknis dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial
 - c. Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial
 - d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial
 - e. Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu:
 - a. Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan
 - b. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan
 - c. Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 51 berikut ini.

Tabel 51. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis IV Tahun 2016

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
1.	Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm. Indikator Sasaran: Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ke mitraan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	- Terlaksananya Musrenbanghuda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota	100%	
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	60 Orang	60 Orang	100%	
			Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Meningkatkan kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola	17 Kelompok	17 Kelompok	100%	



No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
				hutan (Hkm, HN, HTR dan HR Kemitraan)				
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	- Terjalinnnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)	60 Orang	60 Orang	100%	
	Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah		Terlaksananya pengumpulan, koordinasi dan monitoring Kelompok Kerja Mangrove Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		- Hasil perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan	5 Laporan	5 Laporan	100%		
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	- Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan website kehutanan, pembuatan dokumen statistik kehutanan dan penyebarluasan informasi kehutanan serta rekonsiliasi penguatan sistem informasi kehutanan	4 Laporan	4 Laporan	100%	
	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan		- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan, pembinaan DAK bidang kehutanan dan rapat money	3 Laporan	3 Laporan	100%		
	Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP		- Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2008 pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, audit internal dan audit eksternal	3 Laporan	3 Laporan	100%		



Uraian capaian IKU sasaran strategis Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm adalah sebagai berikut:

1. Indikator Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan" memiliki target sebesar 5,32%, terealisasi sebesar 11,15% dengan tingkat capaian 209,59% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini di dukung oleh Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup seperti terlihat pada Tabel 50 di atas.

Indikator Kinerja Utama "Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan" diukur dengan luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan pada tahun N dibagi jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi dikalikan 100%.

Capaian Target IKU "Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan" Tahun 2016 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 52 berikut ini.

Tabel 52. Capaian Target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat/Kemitraan Per Triwulan Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	a. Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat/Kemitraan	0.0%	3.32%	4.32%	5.32%	0	0	3.94%	118.67	5.02%	116.20	11.15%	209.59

Dari Tabel 52 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan



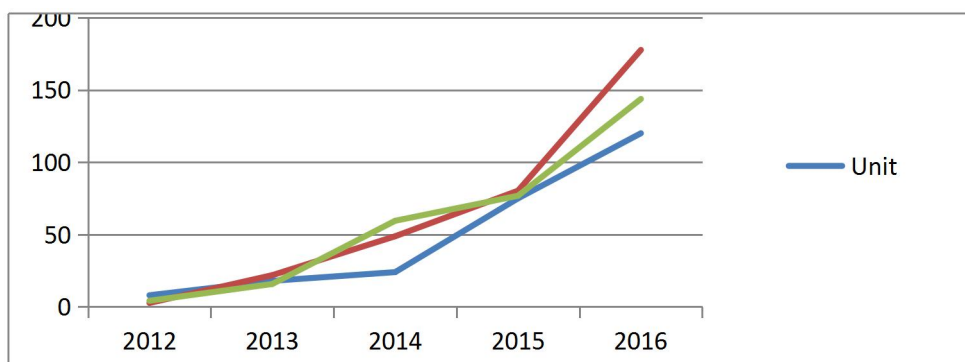
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan dan Penguatan Forum PHBM Provinsi Sumatera Barat serta melaksanakan Sosialisasi dan bimbingan kelembagaan, Pengendalian PHBM.

Capaian Kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari ralisasi seluruh proses perizinan mulai dari Usulan, Proses verifikasi, Penetapan Areal Kerja dan Hakpengelolaan Hutan Nagari/Ijin Pemanfaatan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/Perhutanan Sosial yang meliputi skema Hutan Nagari, Hutan kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat di luar Hutan Rakyat yang berada pada hutan hak yang secara kumulatif hingga pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 53 berikut ini.

Tabel 53. Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial

No	SKEMA	PROGRES								Total
		usulan		Verifikasi		PAK			HPHD/IU PH	
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	
1	Hutan Nagari	51	94.023	7	8.612	7	12.034	13	37.098	78/151.767
2	Hutan Kemasyarakatan	6	1.511	11	5.005	10	6.636	13	3.411	40/16.563
3	Hutan Tanaman Rakyat	0	0	0	0	3	4.818	3	2.117	6/6.935
4	Kemitraan Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0
5	Hutan Adat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0
	TOTAL	57	95.534	18	13.617	20	23.488	29	42.626	175.265

Dari Tabel 52 di atas terlihat untuk skema Hutan Adat masih dalam proses mendorong usulan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Merunut progresnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Gambar 12 berikut ini.



Gambar 12. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Lima Tahun Terakhir

Dari Gambar 12 di atas terlihat perkembangan perhutanan sosial di seluruh tahapan proses baik usulan, verifikasi, PAK dan Hak Pengelolaan/Ijin pemanfaatan secara



komulatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan menggembirakan pada komponen luas areal kelola dan penerima manfaat dari pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat ini erat kaitannya dengan skema perhutanan sosial yang ada, peningkatan unit hutan nagari akan berkorelasi lurus dengan Luas areal kelola dan penerima manfaat mengingat batasan luasan untuk skema hutan nagari bisa seluruh kawasan hutan lindung dan produksi di wilayah administrasi nagarinya disamping personal/masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan nagari akan lebih terbuka dibanding dengan skema HKm dan HTR yang memang terbatas pada jumlah anggota kelompok masing-masing HKm atau HTR.

Peningkatan perkembangan yang signifikan di dua tahun terakhir merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak terkait yang tergabung dalam kelompok kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat terutama fasilitasi dan pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat yang berkolaborasi dengan penyuluh kehutanan dan tenaga pendamping lainnya yang berkontribusi lebih 90% dari jumlah usulan di Tahun 2016 sebanyak 68 usulan dengan luasan areal kelola 76.000 ha lebih.

Faktor lain yang mendukung percepatan perluasan dan pengembangan Perhutanan sosial di kurun waktu 2016 adalah dukungan penuh dari berbagai lembaga donor melalui LSM seperti REDD+ UNDP, KKI Warsi, Qbar, ICS yang memungkinkan sekretariat Kelompok Kerja PS dapat mendorong percepatan fasilitasi usulan perhutanan sosial melalui penyelenggaraan monitoring dan evaluasi progres fasilitasi usulan, workshop fasilitasi usulan, Rakor Pokja, KKN tematik perluasan dan pengembangan usaha, pelatihan penanganan konflik tenurial, pengukuran karbon, penyelenggaraan kampanye Perhutanan sosial melalui jurnalisme warga, peliputan dan dokumentasi praktekpraktik pengelolaan hutan yang baik serta fasilitasi pembayaran insentif jasa komunal yang menjaga kawasan hutan melalui fasilitasi pengembangan usaha di Perhutanan sosial yang berdampak positif bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tahun 2016, dalam rangka pencapaian target IKU Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 741,023,025,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 790,290,400,- Pada Tahun 2016 ada arahan dari DPKD untuk melakukan penghematan (penundaan kegiatan karena adanya pengurangan DAU tanpa merubah target sasaran) maka alokasi dana untuk mencapai IKU ini telah dikurangi sebesar Rp 262,228,900,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai IKU ini adalah sebesar Rp 528,061,500,- Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 505,479,050,- atau 63,96% terhadap alokasi dana perubahan dan 95,72% terhadap dana pemotongan DAU. Maka Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 284.811.350,- atau 36,04% dari alokasi dana perubahan dan sebesar Rp 22,582,450,-



atau 4,28% dari alokasi dana pemotongan DAU. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 209,59% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Permasalahan:

1. Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian dalam fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Pengembangan perhutanan sosial/pemberdayaan masyarakat.
2. Adanya perubahan Peraturan yang mendasari pelaksanaan fasilitasi Perhutanan Sosial yang memangkas proses sehingga beberapa proses yang teranggarkan dalam Rencana kerja tidak dapat dilaksanakan dan menjadi sisa anggaran dan mempengaruhi serapan anggaran/kinerja.
3. Kurang dukungan dan koordinasi lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial akibat tidak dipahaminya secara menyeluruh perhutanan sosial oleh semua unit kerja di dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Solusi:

1. Memberikan masukan agar perubahan kebijakan penganggaran/penundaan anggaran tidak dilakukan di tahun berjalan
2. Mengusulkan standart pembiayaan khusus untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat yang memiliki komponen dan lokasi tertentu.
3. Mengupayakan pendamping komunal bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk hal dimaksud.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2016 sebagaimana Tabel 54 berikut ini.

Tabel 54. Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

NO	SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN				
				DANA PERUBAHAN	DANA PENUNDAAN	REALISASI	% PERUBAHAN	% PENUNDAAN
1	Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya (100%)	Terpeliharanya batas kawasan hutan sepanjang 70 Km	184,856,500	184,856,500	181,470,400	98.17	98.17
			Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu sebanyak 3 judul	41,307,050	41,307,050	41,032,050	99.33	99.33
			Terantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukan I 13 Kab/kota	146,199,000	146,199,000	129,855,150	88.82	88.82
Jumlah Sasaran I				372,362,550	372,362,550	352,357,600	94.63	94.63



NO	SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN							
				DANA PERUBAHAN	DANA PENUNDAAN	REALISASI	% PERUBAHAN	% PENUNDAAN			
2	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis 0,18%	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas sebanyak 200.000 batang	288,376,000	270,896,000	264,948,100	91.88	97.80			
			Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman 13 Kab/kota	125,000,000	102,957,500	96,282,500	77.03	93.52			
			Terpeliharanya dan teridentifikasi sumber daya genetik tanaman hutan di 4 lokasi	100,000,000	54,503,140	53,690,050	53.69	98.51			
			Terlatihnya dan meningkatnya kapasitas kelompok tani hutan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi tanaman RHL Tahun 2011 sebanyak 10 KTH/10 lokasi	226,305,000	164,928,000	144,488,000	63.85	87.61			
			Termonitornya bangunan konservasi tanah 1 laporan	24,500,000	24,500,000	18,812,650	76.79	76.79			
			Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/DAK oleh Kab/Kota di 18 Kab/kota	100,000,000	99,820,000	87,368,400	87.37	87.53			
			Tersedianya Buku Himpunan Peraturan Pengelolaan DAS 7 pergub'	99,720,000	59,144,000	51,252,800	51.40	86.66			
			Tersedianya dokumen rancangan Kegiatan RHL dan terbinanya pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh pemegang Izin 2 dokumen	67,721,000	67,721,000	59,265,800	87.51	87.51			
			Terlaksananya penanaman Rotan dan Pembangunan Bank Buah 50 Ha	518,146,350	518,146,350	498,063,250	96.12	96.12			
			Terlaksananya Pembangunan Hutan Tanaman Jabon dan Pemeliharaan 1 Tanaman Jabon pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan 60 Ha dan 35 Ha	1,095,508,000	1,095,508,000	965,891,300	88.17	88.17			
			Terlaksananya Pengayaan Hutan Lindung dan reboisasi pengayaan lanjutan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan 125 Ha dan 35 Ha	1,332,705,000	1,331,805,000	1,128,243,800	84.66	84.72			
			Tersedianya sarana prasarana operasional KPHL Bukit Barisan 1 Paket'	952,112,100	952,112,100	908,423,500	95.41	95.41			
			Jumlah Indikator 2.1				4,930,093,450	4,742,041,090	4,276,730,150	86.75	90.19
					Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prefresif/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi 6 laporan	325,000,000	249,668,000	222,141,400	68.35	88.97
Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan 1 kab	93,900,000	87,460,000				83,215,535	88.62	95.15			
Teridentifikasi kawasan hutan rawan bencana/perambahan di 4 lokasi	85,460,000	73,748,000				68,232,200	79.84	92.52			



NO	SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN				
				DANA PERUBAHAN	DANA PENUNDAAN	REALISASI	% PERUBAHAN	% PENUNDAAN
			Terlaksananya pelatihan Tenaga PPHBN dan Penguatan Lembaga PPHBN serta Sosialisasi Perda peran Serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan 80	267,069,500	240,119,500	219,510,950	82.19	91.42
			Terlaksananya pengumpulan data PEP RAD-GRK sektor berbasis kehutanan 1 laporan	150,000,000	124,200,000	98,040,000	65.36	78.94
			Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar kawasan hutan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan 2 laporan	46,573,500	44,856,200	43,976,200	94.42	98.04
			Jumlah Indikator 2.2	968,003,000	820,051,700	735,116,285	75.94	89.64
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya (2011-2015)	Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) 33 kali	253,170,000	239,360,000	220,608,650	87.14	92.17
			Jumlah Indikator 2.3	253,170,000	239,360,000	220,608,650	87.14	92.17
			Jumlah Sasaran II	6,151,266,450	5,801,452,790	5,232,455,085	85.06	90.19
3	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 1 laporan	74,760,000	41,020,000	34,247,150	45.81	83.49
			Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan Olahan, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman sebanyak 3 laporan	124,945,000	81,075,000	78,826,000	63.09	97.23
			Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan sebanyak 1 laporan	124,300,000	124,300,000	119,074,650	95.80	95.80
			Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan sebanyak 10 Kel	286,040,000	251,540,000	237,829,850	83.15	94.55
			Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPHL Bukit Barisan 2 lokasi	99,838,000	90,738,000	82,344,750	82.48	90.75
			Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan 3 laporan	43,533,500	41,402,500	40,152,500	92.23	96.98
			Jumlah Indikator 3.1	753,416,500	630,075,500	592,474,900	78.64	94.03
		Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada WUDHUK Hutan Alam	124,760,000	124,020,000	118,839,250	95.25	95.82
			Jumlah Indikator 3.1	124,760,000	124,020,000	118,839,250	95.25	95.82
			Jumlah Sasaran III	878,176,500	754,095,500	711,314,150	81.00	94.33



NO	SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN				
				DANA PERUBAHAN	DANA PENUNDAAN	REALISASI	% PERUBAHAN	% PENUNDAAN
4	Meningkatnya Kermitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm.	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	Tertaksananya Musrenbanghuda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota 19 Kab/kota	76,352,450	60,788,450	60,745,050	79.56	99.93
			Tertaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan 60 orang	93,548,000	93,548,000	91,236,000	97.53	97.53
			Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR	173,440,000	83,397,500	78,339,500	45.17	93.94
			Terjalinnnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan) 60 orang	49,480,000	46,370,600	45,920,600	92.81	99.03
			Tertaksananya pengumpulan data, koordinasi dan monitoring KKMD 6 lokasi	50,000,000	17,270,000	15,705,250	31.41	90.94
			Tertaksananya pengembangan dan pemeliharaan website kehutanan, pembuatan dokumen statistik kehutanan dan penyebarluasan informasi kehutanan serta rekonsiliasi penguatan sistem informasi	180,990,900	89,772,900	89,139,900	49.25	99.29
			Tertaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan, pembinaan DAK bidang kehutanan dan rapat movev 3 laporan	81,008,000	58,498,000	48,865,700	60.32	83.53
			Tertaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2008 pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, audit internal dan audit eksternal 3 laporan	85,471,050	78,416,050	75,527,050	88.37	96.32
Jumlah Sasaran IV				790,290,400	528,061,500	505,479,050	63.96	95.72
			Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat untuk 12 Bulan	40,000,000	40,000,000	39,984,000	99.96	99.96
			Tertaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet ntuk 12 Bulan	325,600,000	211,140,000	199,177,281	61.17	94.33
			Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan 1 tahun	1,100,000	1,100,000	989,323	89.94	89.94
			Tertaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor ntuk 12 Bulan	210,517,275	210,517,275	210,445,000	99.97	99.97
			Tersedianya alat-alat tulis kantor untuk 1 tahun	82,910,000	82,910,000	82,910,000	100.00	100.00
			Tertaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD untuk 1 tahun	39,999,800	39,999,800	39,999,000	100.00	100.00
			Tertaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ntuk 12 Bulan	10,000,000	10,000,000	9,987,000	99.87	99.87
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 150 unit*	577,670,500	469,795,500	461,676,000	79.92	98.27
			Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan untuk 12 Bulan	12,000,000	12,000,000	10,958,000	91.32	91.32



NO	SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN				
				DANA PERUBAHAN	DANA PENUNDAAN	REALISASI	% PERUBAHAN	% PENUNDAAN
			Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD untuk 1 tahun	39,999,800	39,999,800	39,999,000	100.00	100.00
			Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ntuk 12 Bulan	10,000,000	10,000,000	9,987,000	99.87	99.87
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 150 unit	577,670,500	469,795,500	461,676,000	79.92	98.27
			Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan untuk 12 Bulan	12,000,000	12,000,000	10,958,000	91.32	91.32
			Tersedianya makanan dan minuman rapat	10,000,000	10,000,000	9,870,000	98.70	98.70
			Terseenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	200,000,000	166,202,000	145,218,216	72.61	87.37
			Tersedianya jasa sopir kantor untuk 12 Bulan	25,152,725	25,152,725	25,152,725	100.00	100.00
			Terlaksananya makan dan minum untuk piket senjata api dan pengamanan kantor untuk 12 Bulan	233,520,000	233,520,000	230,588,800	98.74	98.74
			Tersedianya jasa dokumentasi dan publikasi untuk 12 Bulan	10,000,000	10,000,000	7,950,000	79.50	79.50
			Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam; pembacaan Al-Quran; Ustadz untuk 12 Bulan	15,000,000	15,000,000	14,000,000	93.33	93.33
			Terlaksananya pembangunan gedung kantor UPTD, gudang persemaian, pagar persemaian, pembangunan koridor, pembangunan garase UPTD, bangunan pos jaga	2,442,365,500	2,263,616,750	2,262,286,000	92.63	99.94
			Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua sebanyak 6 unit	1,231,684,525	1,231,684,525	1,229,534,275	99.83	99.83
			Terlaksananya penyediaan meubelair sebanyak 72 unit	121,588,500	121,588,500	121,588,500	100.00	100.00
			Terlaksananya pengadaan Komputer, laptop, scanner A0 sebanyak 9 unit	246,715,200	246,715,200	246,715,200	100.00	100.00
			Terlaksananya alat studio, komunikasi dan informasi sebanyak 8 unit	297,533,000	297,533,000	297,533,000	100.00	100.00
			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas sebanyak 6 unit	191,909,700	191,909,700	191,909,700	100.00	100.00
			Terlaksananya perbaikan sarana prasarana mushala, perbaikan jendela dan atap gedung sebanyak 3 unit	67,819,900	67,819,900	67,819,900	100.00	100.00
			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional selama 12 bulan	196,510,000	196,510,000	142,699,381	72.62	72.62
			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebanyak 53 unit	22,600,000	22,600,000	19,550,000	86.50	86.50
			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi sebanyak 39 unit	21,750,000	21,750,000	19,850,000	91.26	91.26



NO	SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) SASARAN	INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA (TARGET) KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN				
				DANA PERUBAHAN	DANA PENUNDAAN	REALISASI	% PERUBAHAN	% PENUNDAAN
			Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik dan jaringan internet kantor untuk 1 tahun	32,840,900	32,840,900	32,781,000	99.82	99.82
			Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset selama 12 bulan	135,506,000	135,506,000	130,088,600	96.00	96.00
			Terlaksananya penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 154 Orang	83,160,000	82,852,000	82,852,000	99.63	100.00
			Terpenuhinya kelkutsertaan dalam bintek implementasi peraturan perundang-undangan 12 bulan	178,178,000	178,178,000	158,881,150	89.17	89.17
			Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan 5 Dokumen	17,445,000	17,445,000	17,445,000	100.00	100.00
			Penyusunan RKA, DPA, DPPA, bahan ekspose, Renja dan Draft Renstra 6 Dokumen	76,864,000	76,864,000	39,394,000	51.25	51.25
			Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran 12 bulan	219,804,000	219,804,000	218,700,000	99.50	99.50
			Jumlah Sasaran Pendukung	7,377,744,525	6,942,554,775	6,768,533,051	91.74	97.49
			TOTAL	15,569,840,425	14,398,527,115	13,570,138,936	87.16	94.25

Dari Tabel 54 di atas dapat dilihat bahwa serapan anggaran Tahun 2016 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp 15.569.840.425,- Pada Tahun 2016 ada arahan dari DPKD untuk melakukan penghematan (penundaan kegiatan karena adanya pengurangan DAU tanpa merubah target sasaran) maka alokasi dana untuk mencapai IKU ini telah dikurangi sebesar Rp 1.171.313.310,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 14.398.527.115,- Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah sebesar Rp 13.570.138.936,- atau 87,16% terhadap alokasi dana perubahan dan 94,25% terhadap dana pemotongan DAU. Maka Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 1,999,701,489,- atau 12,84% dari alokasi dana perubahan dan sebesar Rp 828,388,179,- atau 5,75% dari alokasi dana pemotongan DAU. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target ke empat sasaran strategis dengan rata-rata sasaran sebesar 306,22% dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Rincian serapan anggaran per masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya
Untuk mewujudkan sasaran ini dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 398.726.975,- dan mengalami



perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 372.362.550,- Pada Tahun 2016 ada arahan dari DPKD untuk melakukan penghematan (penundaan kegiatan karena adanya pengurangan DAU tanpa merubah target sasaran) maka alokasi dana untuk mencapai IKU Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya tidak dikurangi. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 352.357.600,- atau 94,63% terhadap alokasi dana perubahan dan terhadap dana pemotongan DAU. Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 20.004.950,- atau 5,37% dari dana yang tersedia.

Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 85% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap telah berhasil dengan baik untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 85%.

2. Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam

Tahun 2016, dalam rangka pencapaian target IKU ini telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 6.635.713.300,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 6.151.266.450,-. Dalam rangka memenuhi kebijakan pemotongan DAU alokasi dana untuk pencapaian taerget IKU ini dipotong sebesar Rp 349.813.660,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai IKU ini adalah sebesar Rp 5.801.453.790,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 5.232.455.085,- atau 85,06% terhadap alokasi dana perubahan dan 90,19% terhadap dana pemotongan DAU. Maka Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 918.811.365,- atau 14,94% dari alokasi dana perubahan dan sebesar Rp 568.997.705,- atau 9,81% dari dana pemotongan DAU.

Memperhatikan realisasi serapan anggaran Sasaran II sebagaimana yang terdapat pada Tabel 54 di atas maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap telah berhasil dengan baik untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 90,19%. Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 85%. Adapun kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 85% adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Sarana Konservasi Tanah

Pagu dana untuk kegiatan ini setelah penundaan (tindaklanjut pemotongan DAU) sebesar Rp 24.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 18.812.650,- (76,79%) dan realisasi fisik 100%. Sisa dana sebesar Rp 5.687.350,- (23,21%) disebabkan karena penghematan dan efisiensi anggaran pada BBM Kegiatan dan perjalanan dinas.



b. Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 + APBD)

Pagu dana untuk kegiatan ini setelah penundaan (tindaklanjut pemotongan DAU) sebesar Rp 1.331.805.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.128.243.800,- (84,72%) dan realisasi fisik 100%. Sisa dana sebesar Rp 203.561.200,- (16,28%) disebabkan karena penghematan dan efisiensi anggaran pada BBM Kegiatan, belanja bahan baku bangunan, perjalanan dinas, jasa pembuatan dan pemeliharaan tanaman.

c. Pengendalian dampak perubahan iklim

Pagu dana untuk kegiatan ini setelah penundaan (tindaklanjut pemotongan DAU) sebesar Rp 124.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 98.040.000,- (78,94%) dan realisasi fisik 100%. Sisa dana sebesar Rp 26.160.000,- (21,06%) disebabkan karena penghematan dan efisiensi anggaran pada BBM Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

3. Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

Tahun 2016, dalam rangka pencapaian target IKU Sasaran Strategis ini telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 1.050.000.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 878.176.500,- Pada Tahun 2016 ada arahan dari DPKD untuk melakukan penghematan (penundaan kegiatan karena adanya pengurangan DAU tanpa merubah target sasaran) maka alokasi dana untuk mencapai IKU ini telah dikurangi sebesar Rp 124.081.000,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai IKU ini adalah sebesar Rp 754.095.500,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU sasaran ini adalah sebesar Rp 711.414.150,- atau 81,00% terhadap alokasi dana perubahan dan 94,33% terhadap dana pemotongan DAU. Maka Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 166.862.350,- atau 19% dari dana yang perubahan tersedia dan sebesar Rp 42.781.350,- atau 5,67% dari dana pemotongan DAU.

Memperhatikan realisasi serapan anggaran Sasaran III sebagaimana yang terdapat pada Tabel 54 di atas maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap telah berhasil dengan baik untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 94,33%. Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 85%. Hanya ada satu kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 85% yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Pagu dana untuk kegiatan ini setelah penundaan (tindaklanjut pemotongan DAU) sebesar Rp 41.020.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 34.247.150,- (83,49%) dan realisasi fisik 100%. Sisa dana sebesar Rp 6.772.858,- (16,51%) disebabkan karena penghematan dan efisiensi anggaran pada BBM Kegiatan, penggandaan dan perjalanan dinas dalam daerah.



4. Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm.

Tahun 2016, dalam rangka pencapaian target IKU sasaran ini telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar Rp 741,023,025,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 790,290,400,- Pada Tahun 2016 ada arahan dari DPKD untuk melakukan penghematan (penundaan kegiatan karena adanya pengurangan DAU tanpa merubah target sasaran) maka alokasi dana untuk mencapai IKU sasaran ini telah dikurangi sebesar Rp 262,228,900,- sehingga total alokasi dan yang digunakan untuk mencapai IKU ini adalah sebesar Rp 528,061,500,- Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 505,479,050,- atau 63,96% terhadap alokasi dana perubahan dan 95,72% terhadap dana pemotongan DAU. Maka Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 284.811.350,- atau 36,04% dari alokasi dana perubahan dan sebesar Rp 22,582,450,- atau 4,28% dari alokasi dana pemotongan DAU.

Memperhatikan realisasi serapan anggaran Sasaran IV sebagaimana yang terdapat pada Tabel 54 di atas maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap telah berhasil dengan baik untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 95,72%. Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 85%. Hanya ada satu kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 85% yaitu Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan. Pagu dana untuk kegiatan ini setelah penundaan (tindaklanjut pemotongan DAU) sebesar Rp 58.498.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 48.865.700,- (83,53%) dan realisasi fisik 100%. Sisa dana sebesar Rp 9.632.300,- (16,47%) disebabkan karena penghematan dan efisiensi anggaran pada BBM Kegiatan, makan minum kegiatan, belanja pakaian kerja lapangan dan perjalanan dinas dalam daerah.

Untuk menunjang tercapainya empat sasaran di atas juga didukung oleh belanja langsung pokok kegiatan yang terdapat pada Program Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Total dana yang dialokasikan untuk kelima program tersebut setelah pemotongan DAU adalah sebesar Rp 6,942,554,775,- dengan realisasi sebesar Rp 6.768.533.051,- atau sekitar 97,49%.

Memperhatikan realisasi serapan anggaran kegiatan pendukung sebagaimana yang terdapat pada Tabel 54 di atas maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap telah berhasil dengan baik untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 97,49%. Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 85%. Adapun kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 85% adalah sebagai berikut :



- a. **Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi**
Pagu dana untuk kegiatan ini setelah penundaan (tindaklanjut pemotongan DAU) sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.950.000,- (79,50%) dan realisasi fisik 100%. Sisa dana sebesar Rp 2.050.000,- (20,50%) disebabkan karena penghematan dan efisiensi anggaran pada Belanja publikasi.

- b. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**
Pagu dana untuk kegiatan ini setelah penundaan (tindaklanjut pemotongan DAU) sebesar Rp 196.510.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 142.699.381,- (72,69%) dan realisasi fisik 100%. Sisa dana sebesar Rp 53.810.619 (27,38%) disebabkan karena penghematan dan efisiensi anggaran pada jasa service, penggantian suku cadang, BBM gas dan Pelumas, jasa KIR dan bElanja Pajak Kendaraan.

- c. **Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**
Pagu dana untuk kegiatan ini setelah penundaan (tindaklanjut pemotongan DAU) sebesar Rp 76.864.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 39.394.000,- (51,25%) dan realisasi fisik 100%. Sisa dana sebesar Rp 37.470.000,- (48,75%) disebabkan karena penghematan dan efisiensi anggaran pada Seminar Kit sebesar Rp 1.500.000,- Spanduk sebesar Rp 600.000, Belanja akomodasi peserta konsultasi publik Renstra (Fulllday Meeting) sebesar Rp 12.6000.000,- Transoportasi peserta konsultasi publik Renstra sebesar Rp 6.000.000, Honor Narasumber sebesar Rp 7.800.000,- Belanja makan dan minum rapat sebesar 9.235.000,- Dana ini dialokasi untuk biaya rapat penyusunan Renstra dan penyusunan anggaran. Rapat tetap dilaksanakan beberapa kali dengan output tersusunnya renstra dan RKA 2017 tapi peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang direncanakan dan pada waktu tertentu peserta rapat tidak diberi konsumsi cukup air aqua.
Belanja makan dan minuman konsinyasi sebesar Rp 935.000,-. Jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan rencana. Awalnya dialokasi untuk 50 orang tapi yang hadir hanya 33 orang. Ouput dari konsinyasi yaitu tersusunnya RKA 2017 tetap tercapai Konsultasi publik renstra ditunda pelaksanaannya sampai dengan pelantikan SOTK baru (Triwulan I TA 2017). Jika tetap dilaksanakan merupakan pemborosan anggaran sebesar Rp 28.500.000,- sementara Renstra Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 akan direvisi kembali sesuai dengan peralihan kewenangan dan SOTK baru sebagai implemtasi dari UU No 23 tahun 2014. Untuk Konsultasi Publik Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah dianggarkan kembali pada tahun 2017.



BAB IV. PENUTUP

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang telah dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen sistem AKIP adalah:

1. Perencanaan Kinerja

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra dengan menambahkan indikator outcome di samping indikator output yang telah ada sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja minimal sekali dalam enam bulan.

3. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran bulanan APBD dan APBN tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan. Sebelum menyusun laporan bulanan APBD dan APBN dilakukan rekonsiliasi data realisasi keuangan antara Subbag Keuangan dan Subbag Program sehingga data realisasi keuangan dalam laporan bulanan APBD dan APBN sama dengan data realisasi keuangan dalam LRA.

4. Evaluasi Kinerja

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dalam bentuk rapat monev bulanan, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

5. Capaian Kinerja

Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak berulang kembali di Tahun 2016.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2016 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat di minimalisir seluruh kendala dan



hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* bidang kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan kehutanan itu sendiri, seperti terlihat pada Tabel 55.

Tabel 55. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sasaran	Jumlah IKU	Capaian Sasaran (%)
<i>Sasaran 1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>
<i>Sasaran 2</i>	<i>3</i>	<i>619,2</i>
<i>Sasaran 3</i>	<i>2</i>	<i>295,58</i>
<i>Sasaran 4</i>	<i>1</i>	<i>209,58</i>
Rata-rata	7	306,09

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruhnya kawasan hutan di tata batas dan ditetapkan, masih adanya konflik kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan secara operasional masih terkendala dengan peta dasar yang tersedia, masih ada tumpang tindih dan *non prosedural* perizinan.
2. Pengumpulan Data penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan pada Tahun 2011 belum dilakukan secara keseluruhan pada seluruh lokasi penanaman mengingat sub kegiatan monitoring masuk dalam anggaran perubahan APBD Tahun 2016 sehingga waktu yang tersedia hanya sekitar 2 bulan.
3. Tenaga pengamanan hutan, terutama PPNS, sangat terbatas dan saat ini menjabat sebagai pejabat struktural sehingga tidak bisa menangani kasus secara intens.
4. Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang kebakaran hutan dan lahan.
5. Hotspot banyak terdapat di luar kawasan hutan akan tetapi upaya instansi terkait di daerah dalam pengendalian kebakaran lahan masih kurang.
6. Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu di Sumatera Barat hanya terealisasi sebesar 42,76%. Hal ini disebabkan karena target produksi HHK pada PT Multi Karya Lisun Prima tidak dapat terealisasi hal ini disebabkan adanya konflik antara PT Multi Karya Lisun Prima dengan masyarakat sekitar lokasi.
7. Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian dalam fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Pengembangan perhutanan sosial/pemberdayaan masyarakat.
8. Adanya perubahan Peraturan yang mendasari pelaksanaan fasilitasi Perhutanan Sosial yang memangkas proses sehingga beberapa proses yang teranggarkan dalam Rencana kerja tidak dapat dilaksanakan dan menjadi sisa anggaran dan mempengaruhi serapan anggaran/kinerja.



9. Kurang dukungan dan koordinasi lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial akibat tidak dipahaminya secara menyeluruh perhutanan sosial oleh semua unit kerja di dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

1. Melakukan sosialisasi batas kawasan hutan, melakukan identifikasi konflik tenurial, melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di Kab/Kota;
2. Pada Tahun 2017 telah dianggarkan sub kegiatan monitoring dan evaluasi penanaman tahun 2012 secara tepat sehingga dapat dilakukan pada awal tahun dan lokasi yang akan dimonitoring tingkat keterwakilannya terhadap objek evaluasi diharapkan akan menjadi lebih tinggi.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4. Menambah jumlah PPNS.
5. Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti: apel siaga, kampanye, dan lain-lain.
6. Melengkapi MPA dan kelompok tani pengamanan swadaya dengan sarpras pemadam kebakaran
7. Dinas Kehutanan menyarakann Pihak PT.Multi Karya Lisun Prima untuk melakukan pendekatan secara persuasif dengan masyarakat sekitar lokasi perusahaan sehingga pada Tahun 2017 perusahaan dapat kembali berproduksi sehingga target yang ditetapkan dapat direalisasikan.
8. Memberikan masukan agar perubahan kebijakan penganggaran/penundaan anggaran tidak dilakukan di tahun berjalan
9. Mengusulkan standart pembiayaan khusus untuk kegiatan yang bersifat pemberda yaan masyarakat yang memiliki komponen dan lokasi tertentu.
10. Mengupayakan pendamping komunal bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk hal dimaksud

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang lebih tinggi dan *stakeholders* yang berkepentingan serta dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat.



Lampiran